



BAB I P E N D A H U L U A N

A. DASAR HUKUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya undang - undang tersebut juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan tuntunan zaman yang tidak terhindarkan. Selain karena landasan filosofinya mengarah pada peningkatan demokrasi dan kinerja daerah, otonomi daerah juga dipandang akan mengurangi beban pemerintah pusat.

Secara umum Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif



dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mengevaluasi proses serta perkembangan penyelenggaraan kewenangan daerah dan juga sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disebutkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa "*Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*".

Atas dasar tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Gowa Tahun 2019 disusun untuk menjelaskan arah prioritas pembangunan daerah yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan, sehingga secara terperinci nampak hasil - hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalah dan berbagai hal yang dianggap penting selama tahun 2019.



Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah antara lain :

1. UNDANG - UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI

Dasar hukum terbentuknya Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa yang merupakan turunan dari Undang - undang Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto - Takalar.

2. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka ditetapkan undang - undang yang berisikan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas.

Undang - Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat diperlukan dalam kehidupan ketatanegaraan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang akuntabel di hadapan masyarakat.

3. UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam undang - undang ini, meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas



kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyusunan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyesuaian anggaran.

Belanja Daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi dan program, kegiatan dan jenis belanja. Hal ini berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Undang - Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi negara dengan maksud untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sehingga antara kewenangan dan dana yang diperlukan dapat digunakan dengan sebaik - baiknya untuk pelaksanaan tugas Pemerintahan di daerah.

5. UNDANG - UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

Untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan dilakukan oleh BPK yang meliputi seluruh unsur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti antara lain melalui pembahasan bersama dengan pihak terkait.



6. UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

7. UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Undang - Undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk di dalamnya mengatur tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam rangka mengembangkan mekanisme **checks and balances** antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai mitra yang sejajar demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maka laporan pertanggungjawaban tersebut sifatnya berubah menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 366 ayat (1) huruf h



yang berbunyi : “*Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*”.

Laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut sifatnya sebagai suatu ***progress report***, yang tidak membawa implikasi pemberhentian Kepala Daerah.

8. UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Otonomi daerah menjadi sangat penting berkaitan dengan upaya peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelaksanaan pembangunan agar terwujud desentralisasi yang dapat menghasilkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan guna semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menghadapi dinamika kehidupan, baik di dalam maupun di luar negeri, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai prinsip - prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Upaya ini merupakan langkah strategis sekaligus peluang bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam upaya mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

9. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, keterkaitan antara kebijakan (***policy***), perencanaan (***planning***), dengan penganggaran (***budget***) oleh



pemerintah daerah, lebih sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

10. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah/Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

11. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

12. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

13. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi daerah yang belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

14. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk menentukan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan memacu pertumbuhan daerah secara terus menerus, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kegiatan peningkatan pengembangan kapasitas daerah. Untuk itu,



terlebih dahulu harus diketahui kesenjangan kemampuan antar satu daerah dengan daerah lainnya yang meliputi aspek sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya, guna mengetahui keberhasilan dan kesenjangan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya, diperlukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa 2005 - 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan.
- Terwujudnya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didukung dengan kinerja pemerintahan daerah yang maju dan profesional.
- Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- Menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan per lima tahunan.

16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan



sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah selama kurun waktu 2016 - 2021.

17. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, dan Potensi Daerah.

18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 10 NOMOR TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah merupakan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif memuat program kerja tahunan, dan menjadi pedoman kerja dan sekaligus sebagai indikator kinerja yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2019.

B. VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA

1. VISI KABUPATEN GOWA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan.



Penjabaran mengenai visi yang menjadi tujuan dalam konteks perencanaan strategis senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang dianut organisasi. Kabupaten Gowa sebagai perwujudan organisasi pemerintah daerah, telah mengejawantahkan nilai-nilai kultural dan historis yang dimiliki menjadi sumber inspirasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Bertitik tolak dari filosofi itu pula yang mendasari pembangunan Kabupaten Gowa untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025, yakni mencapai visi mewujudkan **“Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Seajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, telah ditetapkan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gowa, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing daerah
2. Mendorong kemandirian pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Strategi untuk pelaksanaan visi daerah tersebut telah memasuki tahapan III (ketiga) periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan dua tahapan periode lima tahunan sebelumnya (2005-2010 dan 2010-2015). Untuk mencapai visi jangka panjang daerah tersebut, maka dalam perumusan Visi RPJMD periode ketiga ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2 (dua) periode sebelumnya serta isu dan permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2016-2021.

Selanjutnya bertolak dari kondisi aktual dewasa ini dan merujuk pada Visi Bupati/Wakil Bupati Gowa terpilih serta dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dan Visi



Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu **“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”**, maka dirumuskan visi lima tahunan Kabupaten Gowa yang merupakan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat di daerah ini yang telah dikrisialisasikan dan diformulasikan dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan. Adapun **Visi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci:

Visi di atas memiliki empat pokok visi, yaitu:

1. **Berkualitas** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, religius dan bermartabat sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya secara inklusif. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak-hak anak, dan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan dan angka pengangguran.
2. **Mandiri** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya pengembangan potensi sumber daya alam lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan pendapatan per kapita.
3. **Berdaya saing** dimaknakan sebagai kondisi daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kondisi tersebut ditandai dengan



meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, terkendalinya pemanfaatan ruang, meningkatnya kualitas kawasan permukiman, meningkatnya kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, meningkatnya pengelolaan kawasan, dan meningkatnya kualitas lingkungan. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan pertumbuhan nilai investasi.

4. **Tata kelola pemerintahan yang baik** dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Opini BPK terhadap laporan keuangan.

2. MISI KABUPATEN GOWA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui program-program dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulandan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor.



4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

Misi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan: pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan religius.

Misi “Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan penguatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan, meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan serta meningkatkan kerjasama dan keintegrasian antar desa dan kelurahan dalam pengembangan wilayah.

Misi “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis” yang diwujudkan dalam tatakelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam



mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

C. DATA UMUM DAERAH

1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Gowa berada pada 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan; di mana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km², atau setara dengan 4,02% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas 1.509,87 km² atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km² atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, dan 675 dusun/lingkungan berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.



2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

a. KEPENDUDUKAN

Letak wilayah administrasi tersebut menempatkan Kabupaten Gowa pada posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) yang merupakan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Gowa memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang berdampak signifikan terhadap percepatan peningkatan aktivitas sosial kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa.

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2018 tercatat sebanyak 754.422 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 semester II, jumlah penduduk tercatat sebanyak 757.369 jiwa yang terdiri dari 375.190 jiwa penduduk laki-laki, dan 382.179 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan penduduk laki - laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) sebesar 98 ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk yang merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dan dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk dapat dijadikan parameter tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kabupaten Gowa adalah 399 jiwa/km². Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepadatan penduduk adalah faktor lingkungan, historis dan sosio kultural.

Adapun data penduduk Kabupaten Gowa pada periode tahun 2018 - 2019 secara terinci dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :



**Tabel 1.1. Data Penduduk di Kabupaten Gowa
Tahun 2018 – 2019**

RINCIAN	2018	2019
1. Jumlah Penduduk	754.422	757.369
a. Laki-laki (jiwa)	374.494	375.190
b. Perempuan (jiwa)	379.928	382.179
2. Kepadatan/Km ² (Jiwa/Km ²)	397	399
3. Rata-rata Anggota Rumah Tangga (jiwa/RT)	4	4

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Gowa, 2019.

Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam memiliki jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi dengan ketaatan dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai agama. Kondisi ini telah terbentuk sejak lama dan telah melahirkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepahlawanan dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sultan Hasanuddin dan seorang sufi penyebar Agama Islam ternama Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar.

Jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh **Sultan Hasanuddin** dan ajaran nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh **Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar** membuat keduanya diangkat oleh negara sebagai Pahlawan Nasional. Kedua tokoh tersebut telah melahirkan jiwa kepahlawanan yang menjiwai nurani masyarakat Gowa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. KETENAGAKERJAAN

Indikator ketenagakerjaan yang biasa digunakan dalam evaluasi kebijakan pemerintah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan struktur penyerapan tenaga kerja baik berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja. Rujukan yang digunakan dalam penyusunan indikator ketenagakerjaan didasarkan pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Pendekatan teori yang digunakan berdasarkan konvensi *Standard Labor Force Concept* Nomor 138 yang dikeluarkan oleh *International Labor Organization* (ILO) pada tanggal 26 Juni



1973 di Jenewa, di mana batasan minimum umur penduduk yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Adapun penduduk yang berusia 15 tahun ke atas digolongkan menjadi dua, yaitu :

- Angkatan kerja, yaitu yang bekerja dan mencari kerja
- Bukan angkatan kerja, yaitu yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya.

Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Gowa tahun 2018 berjumlah 546.497 jiwa, dibanding tahun sebelumnya sebesar 535.919 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 368.466 jiwa dari seluruh penduduk usia kerja, dibanding tahun sebelumnya sebesar 333.179 jiwa.

Dari jumlah penduduk angkatan kerja tersebut di atas, pada tahun 2018 sebanyak 350.784 jiwa sudah bekerja dan sisanya adalah pencari kerja terdaftar sebesar 17.682 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gowa berada di angka 17.682, lebih kecil dari tahun 2017 yang mencapai angka 20.453.

3. KONDISI EKONOMI

a. POTENSI UNGGULAN DAERAH

Kondisi perekonomian suatu wilayah sangat bergantung pada sumber daya alam dan sektor produksi yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor yang ikut membantu nilai tambah perekonomian wilayah yang bersangkutan. Kesanggupan mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan refleksi dari kondisi ekonomi pada periode tertentu tersebut.

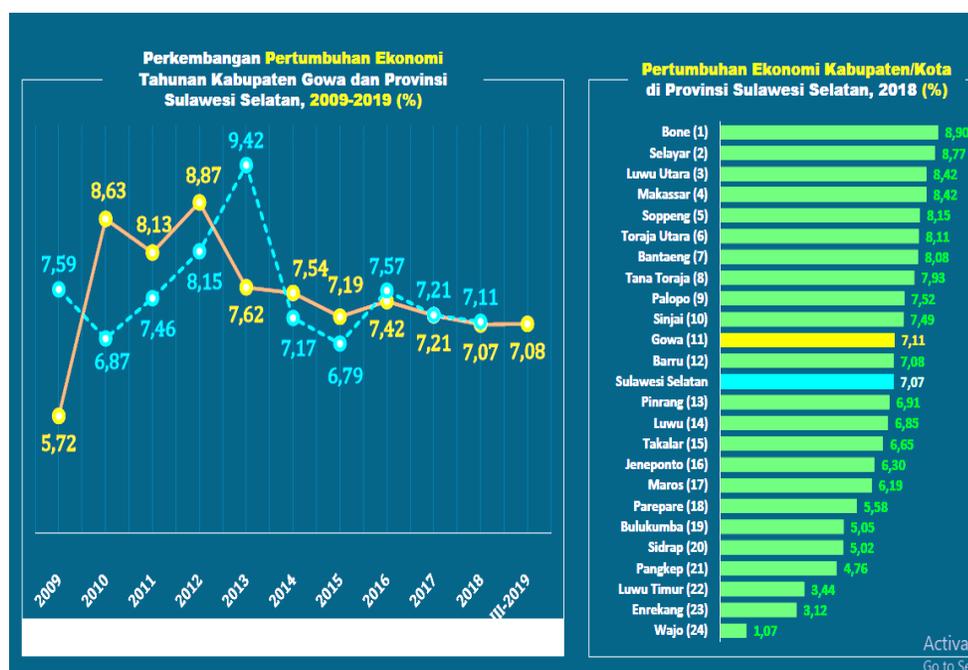
Secara ringkas potensi unggulan Kabupaten Gowa yaitu sektor pertanian dengan kontribusi PDRB tahun 2018 sebesar 29.11%, disusul sektor perdagangan sebesar 12.72%, lalu sektor konstruksi sebesar 11.27%, kemudian sektor real estate sebesar 8.29%, dan informasi komunikasi sebesar 7.99%.



b. PERTUMBUHAN EKONOMI

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa (menggunakan tahun dasar 2009) pada tahun 2013 terjadi penurunan sampai tahun 2015, kemudian dari tahun 2016 sampai tahun 2017 kembali menunjukkan tren penurunan, dan 2015 sampai tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan, namun pertumbuhannya agak lambat. Kondisi konsolidasi terjadi pada tahun 2013 dan 2016, sedangkan pada tahun 2016 menunjukkan performance yang lebih baik yaitu berada pada level 7,42. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kembali menurun di level 7,21 dan pada tahun 2018 kembali menurun di level 7,11.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2013-2018



Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2019

Struktur ekonomi Kabupaten Gowa pada tahun 2018, perekonomian tidak hanya bertumpu lagi pada sektor pertanian tapi sudah beralih ke sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar Rp. 2.42 juta rupiah. Hal Ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Gowa tidak lagi mengandalkan sektor pertanian, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten



Gowa sebagian besar kegiatan ekonominya bergerak disektor perdagangan.

c. PENDAPATAN PERKAPITA

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Gowa selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, PDRB Per Kapita Kabupaten Gowa mencapai Rp 16.98 Juta, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 19.03 Juta. Pada tahun 2016, PDRB Per Kapita mencapai Rp 21.03 Juta, Tahun 2017 sebesar Rp 22.98 Juta dan pada tahun 2018 naik menjadi Rp 25.06 Juta. Peningkatan PDRB per Kapita tersebut disebabkan karena perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

Dengan meningkatnya PDRB per Kapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa semakin baik. Kemudian bila dilihat dari sisi kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Gowa pada tahun 2018 belum mengalami perubahan meskipun dalam rentan waktu lima tahun terakhir ada kecenderungan perlambatan atau penurunan nilai kontribusi yang disebabkan oleh pergeseran kepada sektor-sektor jasa akibat percepatan perputaran perekonomian yang dianggap lebih potensial. Sektor tersebut masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontribusi sebesar 29,11% terhadap nilai PDRB di Kabupaten Gowa.



BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ditempuh dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah diarahkan untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya, sehingga substansi dari aturan tersebut adalah mempertegas dan memperjelas ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dengan desentralisasi pengelolaan keuangan sampai dengan tingkat manajemen terendah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas/Badan/Sekretariat serta Kecamatan dan menuntun kita dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dan barang di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kemudian dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara realistis sesuai potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing unit kerja/pengelola pendapatan. Di samping itu, dilakukan pula pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan ekstensifikasi sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat serta memperhitungkan kebijakan ekonomi biaya tinggi; meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan; pendayagunaan asset-asset daerah yang dapat menghasilkan PAD; mempertahankan keseimbangan antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan, memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata. Prinsip prudential atau kehati-hatian dalam menggunakan sumber dana menjadi komitmen bersama. sehingga dalam merencanakan anggaran belanja benar-benar diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan demikian, dalam melaksanakan pembiayaan, strategi yang ditempuh dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Penyusunan kebijakan umum



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 berdasarkan pada Peraturan Bupati Gowa Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dalam rangka pemenuhan pembiayaan pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kepada masyarakat.

Kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah saat ini telah terbukti memberi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor penerimaan. Besarnya kewenangan pengelolaan pendapatan, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari penerimaan daerah berupa pajak daerah.

Dalam strategi pelaksanaannya dilakukan upaya-upaya antara lain intensifikasi pungutan dan retribusi oleh unit-unit kerja pengelola PAD tanpa membebani masyarakat, mengoptimalkan kinerja Holding Company dan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pendapatan daerah sesuai dengan penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Untuk Tahun Anggaran 2019 jumlah Pendapatan direncanakan sebesar Rp.1.872.059.870.736,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.870.608.908.440,64 atau sebesar 99,92 persen yang terdiri dari :



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Rp.226.383.659.880,00 telah terealisasi sebesar Rp.238.239.570.974,67 atau 105,24 persen, dengan rincian sebagai berikut :

- Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.96.114.635.430,00 dengan realisasi sebesar Rp.112.451.239.497,56 atau 117,00 persen;
- Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.84.296.107.811,00 dengan realisasi sebesar Rp.79.360.833.550,00 atau 94,15 persen;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.5.170.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.966.988.917,00 atau 96,07 persen;
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.40.802.916.639,00 dengan realisasi sebesar Rp.41.460.509.010,11 atau 101,61 persen.

b. Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp.1.545.252.100.456,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.528.860.873.865,97 atau 98,94 persen, dengan perincian sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, dari target Rp.1.275.221.543.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.258.904.850.116,00 atau 98,72 persen dengan rincian:

- Bagi Hasil Pajak, dari target Rp.15.455.961.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.977.570.920,00 atau 71,02 persen;
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dari target Rp.7.336.232.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.693.094.277,00 atau 63,97 persen;
- Dana Alokasi Umum, dari target Rp.887.926.896.000,00 yang terealisasi 100 persen;
- Dana Alokasi Khusus, dari target Rp.364.502.454.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.355.307.288.919,00 atau 97,48 persen;



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dengan target sebesar Rp.168.072.826.000,00 dengan realisasi sebesar 100 persen.
- 3) Transfer Pemerintah provinsi dengan target sebesar Rp.101.957.731.456,00 dengan realisasi sebesar Rp.101.883.197.749,97 atau 99,93 persen.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan target sebesar Rp.100.424.110.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.103.508.463.600,00 atau 103,07 persen.

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1 Pendapatan Asli Daerah	226.383.659.880,00	238.239.570.974,67	105,24
1.1 Pajak Daerah	96.114.635.430,00	112.451.239.497,56	117,00
1.2 Retribusi Daerah	84.296.107.811,00	79.360.833.550,00	94,15
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.170.000.000,00	4.966.988.917,00	96,07
1.4 Lain-lain PAD Yang Sah	40.802.916.639,00	41.460.509.010,11	101,61
2 Pendapatan Transfer	1.545.252.100.456,00	1.528.860.873.865,97	98,94
2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.275.221.543.000,00	1.258.904.850.116,00	98,72
2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	168.072.826.000,00	168.072.826.000,00	100,00
2.4 Transfer Pemerintah Provinsi	101.957.731.456,00	101.883.197.749,97	99,93
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100.424.110.400,00	103.508.463.600,00	103,07
Jumlah	1.872.059.870.736,00	1.870.608.908.440,64	99,92

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa, 2019.



3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Rasio sarana dan prasarana operasional pendataan dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai.
- b. Kemampuan SDM pengelola PAD, khususnya BUMD masih perlu ditingkatkan.

Dengan segenap daya dan upaya, realisasi **Pendapatan Asli Daerah** tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan, yakni pada tahun 2018 sebesar Rp. 217,112,642,503.37 menjadi Rp. 238.239.570.974,67 pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 21,126,928,471.30 atau 9.73 persen. Untuk tahun anggaran 2019 **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** ditargetkan sebesar Rp 226.383.659.880,00 terealisasi sebesar Rp 238.239.570.974,67 atau sebesar 105,24 persen.

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa, Tahun 2019
(dalam Rupiah)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2019	226.383.659.880,00	238.239.570.974,67	105,24

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, 2019.

Khusus untuk kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode 2018-2019 memperoleh hasil yang cukup menggembirakan, yaitu pada tahun 2018 yang targetnya sebesar Rp. 13.379.635.430,00 milyar lebih, dapat terealisasi sebesar Rp. 13.698.513.072,00 milyar lebih atau sebesar 102,38 persen, sedangkan pada tahun 2019 dengan perencanaan target sebesar Rp. 13.379.635.430,00 milyar lebih, dapat terealisasi sebesar Rp. 13.744.239.789,00 milyar lebih atau sebesar 102.73 persen.

Dengan demikian pada kurun tahun 2018-2019 telah berhasil mencapai target diatas seratus persen Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).



Tabel 2.3. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Gowa, Tahun 2018-2019
(Dalam Rupiah)

No	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2018	13.379.635.430,00	13.698.513.072,00	102.38
2	2019	13.379.635.430,00	13.744.239.789,00	102.73

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, 2019.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Fokus kebijakan umum keuangan daerah pada tahun anggaran 2019 adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja pengelolaan belanja daerah yang tetap mengacu pada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

2. Target dan Realisasi Belanja

• Belanja

Jumlah kebutuhan Belanja untuk Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.1.949.937.983.815,39 dan terealisasi sebesar Rp.1.865.956.399.756,48 atau 95,69 persen dari yang dianggarkan yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.1.492.701.734.068,97 yang terealisasi sebesar Rp.1.435.864.711.398,51 atau 96,19 persen dari yang dianggarkan.

b. Belanja Modal

Untuk tahun anggaran 2019 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.455.060.806.046,42 dengan realisasi sebesar Rp.428.521.081.588,97 atau 94,17 persen dari yang dianggarkan.



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi 100,00 persen dari yang dianggarkan.

d. Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.1.675.443.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.070.606.769,00 atau 63,90 persen dari yang dianggarkan.

**Tabel 2.4 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 2019**
(Dalam Rupiah)

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
1.	Belanja Operasi	1.492.701.734.068,97	1.435.864.711.398,51	96,19
1.1	Belanja Pegawai	790.178.678.671,43	754.187.443.253,00	95,45
1.2	Belanja Barang dan Jasa	445.432.621.889,46	426.139.538.479,94	95,67
1.3	Belanja Hibah	13.475.075.750,00	12.354.922.000,00	91,69
1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.057.550.000,00	2.625.000.000,00	85,85
1.5	Belanja Bantuan Keuangan	240.557.807.758,09	240.557.807.665,57	100,00
2.	Belanja Modal	455.060.806.046,42	428.521.081.588,97	94,17
2.1	Belanja Modal Tanah	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.548.806.393,10	56.630.071.854,66	85,10
2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	114.131.930.175,57	103.089.455.921,45	90,32
2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	257.087.496.752,75	251.623.163.147,86	97,87
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.223.572.725,00	17.110.790.665,00	99,35
2.6	Belanja Aset Lainnya	68.000.000,00	67.600.000,00	99,41
3.	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
4.	Transfer	1.675.443.700,00	1.070.606.769,00	63,90
	Jumlah	1.949.937.983.815,39	1.865.956.399.756,48	95,69

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa, 2019.



3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Aturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah.
- b. Kurang dan terbatasnya sumber daya aparatur yang menguasai bidang akuntansi terutama dalam pengelolaan keuangan untuk tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/belanja.
- c. Kurangnya perhatian SKPD apabila ada penerapan regulasi dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Solusi terhadap permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Konsistensi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah dan dapat berlaku lama.
- b. Merekrut sumber daya manusia yang menguasai bidang akuntansi, memberikan pelatihan dan atau pendidikan formal bidang pengelolaan keuangan daerah secara umum dan akuntansi secara khusus.
- c. Melakukan sosialisasi dan atau pembagian perundang-undangan juknis/juklak kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Adapun pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 terdiri atas Penerimaan Daerah atas pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.141.351.245.044,91 yang mana dapat terealisasi sebesar Rp.141.351.245.045,91 atau 100,00 persen dari target yang direncanakan, sedangkan Pengeluaran Daerah atas pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.57.544.833.965,52 terealisasi sebesar Rp.53.480.000.000,00 atau 92,94 persen.



BAB III

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 URUSAN KONKRUEAN

1. RINGKASAN URUSAN WAJIB

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib dibedakan atas dua, yakni urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu fokus pelaksanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Gowa.

• ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah organisasi perangkat daerah/instansi yang melaksanakan urusan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4.223 orang termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 20 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan pendidikan dapat terwujud.

• ***Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019***

a. Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.548.918.218,68 dan terealisasi sebesar Rp.1.513.890.359,00 atau 97,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.382.455,- dan terealisasi sebesar Rp.98.975.855,- atau 94,82% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.73.301.751,- atau 85,43% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.589.419.263,68 dan terealisasi sebesar Rp.587.389.519,- atau 99,66% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.368.006.500,- dan terealisasi sebesar Rp.361.326.800,- atau 98,18% dari alokasi anggaran.
- Administrasi Umum Operasional Korwil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.401.310.000,- dan terealisasi sebesar Rp.392.896.434,- atau 97,90% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.843.562.307,90 dan terealisasi sebesar Rp.300.999.812,00 atau 35,68% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.502.440,- atau 94,63% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.662.702,90 dan terealisasi sebesar Rp.11.662.700,- atau 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.777.899.605,- dan terealisasi sebesar Rp.237.634.672,- atau 30,55% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.119.330.000,- atau 95,20% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.50.230.000,- atau 91,58% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.64.100.000,- atau 97,86% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.795.975.000,- dan terealisasi sebesar Rp.712.517.000,- atau 89,51% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.325.368.400,- dan terealisasi sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.319.350.200,- atau 98,15% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.448.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.443.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan dan Pelaporan Anggaran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.030.400,- dan terealisasi sebesar Rp.78.633.200,- atau 97,04% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan dan Pelaporan Asset Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Profile Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.690.000,- dan terealisasi sebesar Rp.109.074.000,- atau 96,79% dari alokasi anggaran.

f. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan anak usia dini, melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.678.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.646.500.000,- atau 95,27% dari alokasi anggaran.

g. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendidikan dasar lanjutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.854.206.491,13 dan terealisasi sebesar Rp.100.789.859.563,37 atau 90,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Alat Peraktik dan Peraga Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.362.515.444,- dan terealisasi sebesar Rp.9.327.715.630,- atau 90,01% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pelaksanaan Pendidikan Gratis SD/MI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.053.215.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.747.199.000,- atau 93,94% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMP/MTS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.929.726.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.530.039.000,- atau 86,36% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Pendidikan Dana Bos, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.101.299.024,- dan terealisasi sebesar Rp.80.342.006.220,- atau 92,24% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Pertama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.147.137.408,- dan terealisasi sebesar Rp.123.002.600,- atau 83,60% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.855.208,- dan terealisasi sebesar Rp.164.995.200,- atau 96,57% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Gedung Sekolah SD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.827.667.105,13 dan terealisasi sebesar Rp.3.293.871.913,37 atau 68,23% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Gedung Pusat Belajar Guru, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.261.791.302,- dan terealisasi sebesar Rp.261.030.000,- atau 99,71% dari alokasi anggaran.

h. Program Pendidikan Non Formal

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak usia sekolah serta tenaga pendidik informal di luar jalur pendidikan formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.235.134.400,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemberdayaan Tenaga Pendidikan dan Non Formal (PAUD SPAS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.034.400,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.100.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi dan pengakuan terhadap tenaga pendidik di semua tingkatan pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.011.560.930,19 dan terealisasi sebesar Rp.3.928.449.709,00 atau 97,93% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.750.700,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemantapan Model Mata Pelajaran Iman dan Taqwa (IMTAQ) Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.654.027.200,- dan terealisasi sebesar Rp.651.297.763,- atau 99,58% dari alokasi anggaran.
- Workshop Integrasi Kurikulum 2013, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.432.611.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.900.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.838.525.000,- atau 93,13% dari alokasi anggaran.
- Pemantapan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.573.341.428,19 dan terealisasi sebesar Rp.560.619.860,- atau 97,78% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Workshop Pemantapan Struktur Kurikulum berdasarkan SKS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.238.344.602,- dan terealisasi sebesar Rp.238.344.600,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Workshop Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.086.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Program Pengembangan Pusat Belajar Guru (PBG) Kabupaten Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.994.214.786,00,- atau 99,42% dari alokasi anggaran.

j. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini bertujuan meningkatkan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.226.190.767,- dan terealisasi sebesar Rp.2.181.308.203,- atau 97,98% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.625.274.000,- dan terealisasi sebesar Rp.622.500.000,- atau 99,56% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Dewan Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.276.317,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Naskah Ujian UAN/UAS dan Buku Raport, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.480.430.500,- dan terealisasi sebesar Rp.471.021.936,- atau 98,04% dari alokasi anggaran.
- Penghargaan Siswa Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah Berprestasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.205.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengembangan Tata Kelola Sistem Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.299.472.400,- dan terealisasi sebesar Rp.283.272.400,- atau 94,59% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Sistem Pembelajaran Berbasis English Camp, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.222.856.700,- dan terealisasi sebesar Rp.206.356.700,- atau 92,60% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Sentra Edukasi Gowa Kabupaten Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.398.675.600,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

k. Program DAK Bidang Pendidikan

Program ini bertujuan memperlancar kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.621.099.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.33.465.109.096,90 atau 96,66% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembangunan Gedung SD/SLB (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.054.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.710.709.007,90 atau 98,57% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Gedung SMP (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.233.947.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.230.965.518,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SD/SLB (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.464.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.149.992.640,- atau 78,55% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SMP (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.124.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.830.258.800,- atau 86,16% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sistem Pendidikan Non Formal (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.307.857.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Gedung Satuan Pendidikan Non Formal (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.824.275.258,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Sarana dan Prasarana TK PAUD Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.432.759.992,- dan terealisasi sebesar Rp.411.050.873,- atau 94,98% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan TK PAUD Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%.**

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Pendidikan yang direncanakan akan dicapai Dinas Pendidikan pada T.A. 2019 sebesar Rp.156.265.965.764,90 dan terealisasi sebesar Rp.144.212.448.343,27 atau 92,29% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.453.663.860.430,95 dan terealisasi sebesar Rp.437.710.709.121,00 atau 96,48% dari alokasi anggaran.

2. URUSAN KESEHATAN

Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu fokus dan indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tingginya Angka Harapan Hidup Masyarakat. Kabupaten Gowa yang sebagai salah satu kabupaten yang menerapkan program Kesehatan Gratis berupaya untuk terus mensejahterakan masyarakat Gowa.



• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa adalah instansi yang disertai tugas menangani urusan kesehatan telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1.321 orang termasuk tenaga kesehatan di 28 puskesmas dengan 38 jabatan struktural yang diisi oleh 38 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan kesehatan dapat terwujud.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

a. Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program rutin yang diadakan Urusan Kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.395.068.354,- dan terealisasi sebesar Rp.6.111.499.788,- atau 95,57% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.319.862,- dan terealisasi sebesar Rp.179.239.100,- atau 99,40% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.742.808.220,- dan terealisasi sebesar Rp.1.710.933.483,- atau 98,17% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.899.739,- atau 92,71% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.317.097.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.269.535.940,- atau 97,95% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.104.707.500,- atau 98,46% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.210.000,- atau 88,95% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.643.387.500,- dan terealisasi sebesar Rp.641.066.081,- atau 99,64% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.375.405.772,- dan terealisasi sebesar Rp.1.178.907.945,- atau 85,71% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.198.967.250,- dan terealisasi sebesar Rp.1.162.002.060,- atau 96,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.355.467.250,- dan terealisasi sebesar Rp.318.985.060,- atau 89,74% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.288.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.287.632.000,- atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.419.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.418.885.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.284.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp.283.318.000,- atau 99,43% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.219.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp.218.318.000,- atau 99,26% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.597.175.000,- dan terealisasi sebesar Rp.515.725.000,- atau 86,36% dari alokasi anggaran.



e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.643.000,- dan terealisasi sebesar Rp.73.278.000,- atau 99,50% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Profil Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.150.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.493.000,- dan terealisasi sebesar Rp.54.128.000,- atau 99,33% dari alokasi anggaran.

f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan pada gudang farmasi/apotik bagi pasien yang berkunjung baik itu pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap melalui kegiatan Pengadaan Obat Generik (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.339.829.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.282.821.303,50 atau 98,69% dari alokasi anggaran.

g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.989.515.000,- dan terealisasi sebesar Rp.59.914.764.576,- atau 98,24% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelayanan Kesehatan Bagi Hari Besar Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.560.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis Sarana Distribusi Pangan/Toko, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.795.000,- dan terealisasi sebesar Rp.45.495.000,- atau 99,34% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Tes Kebugaran Bagi Calon Jamaah Haji, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.655.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.475.000,- atau 98,92% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Tanaman Obat Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.010.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pertemuan Triwulan Petugas Kesehatan Olahraga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.100.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.185.365.000,- dan terealisasi sebesar Rp.158.269.500,- atau 85,38% dari alokasi anggaran.
- Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan Penilaian Puskesmas Berprestasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.325.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis Klinik Swasta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.425.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Program pelayanan Kesehatan Gratis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.769.876.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.800.955.000,- atau 97,29% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.523.819.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.508.038.998,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Pemahaman Standar dan Instrumen (Akreditasi Puskesmas), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.983.955.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.922.471.078,- atau 96,90% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Alkes di Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.415.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Akreditasi bagi Klinik Swasta dan Praktek Dokter, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.020.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring Hasil Pembinaan Sistem Rujukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.135.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.145.000,- atau 96,35% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi Pelaksanaan PSC Kabupaten, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.460.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penanggulangan Krisis Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.710.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Akreditasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.940.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hidup sehat masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.254.331.200,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pembuatan Radio Spot, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kapasitas Satuan Karya Saka Bakti Husada, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Media Cetak Promosi Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Promosi Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.118.460.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Revitalisasi Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.531.200,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Buku Rapor UKS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.520.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Lokakarya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.420.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.435.000,- dan terealisasi sebesar Rp.161.215.000,- atau 99,86% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Bimbingan Teknis Program Gizi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.475.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.255.000,- atau 96,60% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Bayi Gizi Buruk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.128.960.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan lingkungan sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.177.010.400,- dan terealisasi sebesar Rp.168.698.731,- atau 95,30% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Verifikasi Desa dan Kecaatan ODF (Open Defecation Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.645.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Bahan dan Reagens Laboratorium, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.480.000,- dan terealisasi sebesar Rp.64.168.331,- atau 88,53% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Program Kabupaten Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.165.400,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi Pengelolaan Program Kesling dan STBM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.720.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program ini bertujuan meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.401.012.500,- dan terealisasi sebesar Rp.400.765.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.427.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit Berpotensi KLB /Wabah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.492.500,- atau 98,76% dari alokasi anggaran.
- Monev Program Imunisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Logistik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.160.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis Program P2, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.020.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pertemuan Petugas terlatih Kanker Leher Rahim dan IV A, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Petugas UBM dan KTR, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pertemuan Monev Petugas PTM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp.36.065.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan melalui kegiatan Publikasi Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.196.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp.593.559.097,- atau 49,63% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dan



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

teralisasi sebesar Rp.348.289.097,- atau 77,40% dari alokasi anggaran.

- Publikasi Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.050.000,- dan teralisasi sebesar Rp.145.500.000,- atau 99,62% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.99.770.000,- atau 99,77% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Master Plan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%**.

m. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin (MASKIN) melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.944.707.269,- dan teralisasi sebesar Rp.37.034.788.507,- atau 95,10% dari alokasi anggaran.

n. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Program ini bertujuan untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.605.856,- dan teralisasi sebesar Rp.101.428.534,- atau 72,14% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.133.122.056,- dan teralisasi sebesar Rp.101.428.534,- atau 76,19% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Pustu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.483.800,- **realisasi fisik dan keuangan 0%**.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

o. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana RS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.956.123.508,- dan terealisasi sebesar Rp.6.461.529.552,- atau 92,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembangunan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.900.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.895.670.000,- atau 99,52% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.566.110.006,- dan terealisasi sebesar Rp.2.348.302.852,- atau 91,51% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.54.000.000,- atau 27,00% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Mobiler Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.179.509.102,- dan terealisasi sebesar Rp.177.832.600,- atau 99,07% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.258.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.161.959.600,- atau 95,73% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.852.169.400,- dan terealisasi sebesar Rp.823.764.500,- atau 96,67% dari alokasi anggaran.

p. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.800.364.839,- dan



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

teralisasi sebesar Rp.2.706.030.011,- atau 96,63% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.527.228.589,- dan teralisasi sebesar Rp.496.630.571,- atau 94,20% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.490.592.340,- atau 98,12% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.567.136.250,- dan teralisasi sebesar Rp.1.514.792.100,- atau 96,66% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Penunjang Medis Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.206.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.204.015.000,- atau 99,04% dari alokasi anggaran.

q. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada lansia, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Lansia/ Bimtek Program Lansia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.790.000,- dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.

r. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan pasien khususnya ibu melahirkan dan anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.056.640.000,- dan teralisasi sebesar Rp.4.335.759.523,- atau 85,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Monitoring dan Evaluasi program Kesehatan Ibu. Anak dan KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.640.000,- dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pelayanan Jaminan Persalinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.027.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.306.119.523,- atau 85,66% dari alokasi anggaran.

s. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.830.660.791,- dan terealisasi sebesar Rp.49.017.092.857,- atau 87,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelayanan Jasa Medis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.692.808.881,- dan terealisasi sebesar Rp.2.539.710.378,- atau 94,31% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.882.991.910,- dan terealisasi sebesar Rp.44.294.810.805,- atau 87,05% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Keamanan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.994.010.732,- atau 99,70% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.860.000,- dan terealisasi sebesar Rp.73.981.250,- atau 92,64% dari alokasi anggaran.
- Program Inovatif SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%**.
- Pelayanan Kesehatan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.104.692,- atau 80,21% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Fasilitas bermain Pasien Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.74.475.000,- atau 99,30% dari alokasi anggaran.



t. Program Perencanaan Sistem Perencanaan

Program ini bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan pertemuan tahunan pada Puskesmas, melalui kegiatan Pertemuan Perencanaan Tahunan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.223.690.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pendampingan Operasional JKN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.690.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pendampingan LSM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

u. Program DAK Bidang Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan yang berasal dari DAK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.918.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.955.698.086,81 atau 94,96% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.659.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.297.795.155,- atau 93,41% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Puskesmas (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.575.233.000,- dan terealisasi sebesar Rp.565.169.000,- atau 98,25% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Berat Puskesmas Perawat (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.952.288.016,31 atau 98,41% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Mobil Ambulance (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.357.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.496.120.000,- atau 99,84% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perangkat Komputer (SIKDA/SIKNAS) (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%**.
- Pengadaan Alat Kesehatan bagi Puskesmas (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.266.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp.264.774.974,- atau 99,49% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional DAK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.286.921.000,- dan terealisasi sebesar Rp.286.823.500,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Penurunan Stunting, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.030.993.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.030.908.540,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Alat Kesehatan dan BMHP Pengendalian Penyakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.740.273.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.709.721.520,50 atau 98,24% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Alat Kesehatan RSUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.995.097.381,- atau 94,06% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Kesehatan yang direncanakan akan dicapai Dinas Kesehatan dan RSUD Syekh Yusuf pada T.A. 2019 sebesar Rp.224.974.240.967,00 dan terealisasi sebesar Rp.210.791.784.826,31 atau 93,70% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Kesehatan dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.915.168.548,20 dan terealisasi sebesar Rp.90.515.964.062,00 atau 101,80% dari alokasi anggaran.



3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa adalah instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 148 orang dengan 29 jabatan struktural yang diisi oleh 29 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.157.637.825,- dan terealisasi sebesar Rp.1.018.062.245,- atau 87,94% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.222.236.000,- dan terealisasi sebesar Rp.207.988.475,- atau 93,59% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.999.500,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.528.125,- dan terealisasi sebesar Rp.12.457.455,- atau 24,18% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.563.000,- dan terealisasi sebesar Rp.188.254.000,- atau 98,79% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.589.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.45.535.000,- atau 96,88% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.473.986.000,- dan terealisasi sebesar Rp.397.442.615,- atau 83,85% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.736.200,- dan terealisasi sebesar Rp.158.796.200,- atau 96,39% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.463.950.362,- dan terealisasi sebesar Rp.461.174.651,- atau 99,40% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.597.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.192.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.565.180,- dan terealisasi sebesar Rp.77.266.460,- atau 97,11% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.271.182,- dan terealisasi sebesar Rp.155.044.710,- atau 99,85% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.325.000,- dan terealisasi sebesar Rp.31.074.481,- atau 99,20% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.123.000,- dan terealisasi sebesar Rp.142.351.800,- atau 92,97% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.145.123.000,- dan terealisasi sebesar Rp.134.351.800,- atau 92,58% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.000.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.143.670.900,- dan terealisasi sebesar Rp.142.435.300,- atau 99,14% dari alokasi anggaran.

f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan meningkatkan daya dukung hubungan antar daerah dan jelajah transportasi darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.207.353.971.261,34 dan terealisasi sebesar Rp.205.923.936.453,92 atau 99,31% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan:

- Pembangunan Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.502.750.017,00 dan terealisasi sebesar Rp.87.437.906.165,91 atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.347.623.241,34 dan terealisasi sebesar Rp.7.021.650.961,70 atau 95,56% dari alokasi anggaran
- Pembangunan Jalan (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.942.805.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.61.951.449.150,31 atau 98,42% dari alokasi anggaran.
- Pengujian dan Pengendalian Mutu (Laboratorium), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.433.800,- dan terealisasi sebesar Rp.25.428.800,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional DAK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.755.823.700,- dan terealisasi sebesar Rp.2.707.965.873,- atau 98,26% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Jalan (Dana Cadangan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.779.535.503,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program ini bertujuan untuk peningkatan pembangunan saluran drainase melalui kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.228.993.140,88 dan



teralisasi sebesar Rp.3.227.561.140,97 atau 99,96% dari alokasi anggaran.

h. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan meningkatkan daya dukung prasarana transportasi darat untuk kelancaran hubungan darat antar daerah dalam wilayah Kabupaten Gowa dan dengan daerah luar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.196.127.174,- dan terealisasi sebesar Rp.2.193.041.950,- atau 99,86% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.883.323.974,- dan terealisasi sebesar Rp.1.880.964.450,- atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.312.803.200,- dan terealisasi sebesar Rp.312.077.500,- atau 99,77% dari alokasi anggaran.

i. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung prasarana transportasi darat untuk kelancaran hubungan darat antar daerah dalam wilayah Kabupaten Gowa dan dengan daerah luar, melalui kegiatan Investigasi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp.47.980.000,- atau 99,46% dari alokasi anggaran.

j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini bertujuan meningkatkan daya dukung peralatan perencanaan, pemeliharaan dan pembangunan sarana/prasarana wilayah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.201.432.600,- dan terealisasi sebesar Rp.199.547.430,- atau 99,06% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.732.600,- dan terealisasi sebesar Rp.150.542.180,- atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.005.250,- atau 96,66% dari alokasi anggaran.

k. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan pengairan serta daya dukung sumber daya air jaringan irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.252.799.489,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.142.104.013,67 atau 98,66% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.501.880,- dan terealisasi sebesar Rp.155.441.880,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.584.455.144,- dan terealisasi sebesar Rp.577.595.644,- atau 98,83% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.998.349,- dan terealisasi sebesar Rp.208.437.649,- atau 96,95% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pertanaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.572.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi dan Konstruksi Jaringan Irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.553.084.616,- dan terealisasi sebesar Rp.1.552.560.394,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.703.592.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.5.606.923.446,67 atau 98,31% dari alokasi anggaran.
- Komisi Irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.595.500,- dan terealisasi sebesar Rp.33.573.000,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.

1. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program ini bertujuan peningkatan pengembangan, pengelola dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.622.570.093,- dan terealisasi sebesar Rp.3.622.013.769,- atau 99,98% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.347.500,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Pompanisasi Jaringan Irigasi Sawah Tadah Hujan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.312.326.772,- dan terealisasi sebesar Rp.311.891.772,- atau 99,86% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.220.464.497,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Sempadan Sungai dan Sempadan Saluran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.431.324,- dan terealisasi sebesar Rp.69.310.000,- atau 99,83% dari alokasi anggaran.

m. Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur dasar masyarakat miskin, melalui kegiatan Program Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.633.060.200,- dan terealisasi



sebesar Rp.630.162.500,- atau 99,54% dari alokasi anggaran.

n. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini bertujuan menciptakan kepastian atau ketetapan peruntukan ruang melalui kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.275.805.600,- dan terealisasi sebesar Rp.1.228.450.600,- atau 96,29% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.111.080.600,- dan terealisasi sebesar Rp.1.109.250.600,- atau 99,84% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.119.200.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Peraturan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.525.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%**.

o. Program Pemanfaatan Tata Ruang

Program ini bertujuan mendukung perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis, melalui kegiatan Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.540.500,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

p. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Program ini bertujuan meningkatkan penataan ruang sesuai dengan karakteristik dan tata letak daerah agar tercipta kejelasan peruntukkan dan atau pengendalian pemanfaatan kawasan lingkungan, melalui kegiatan Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp.61.506.000,- atau 73,81% dari alokasi anggaran.



q. Program Perencanaan Pekerjaan Umum Daerah

Program ini bertujuan peningkatan perencanaan pekerjaan umum daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.567.795.850,- dan terealisasi sebesar Rp.2.563.589.850,- atau 99,84% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Standarisasi Harga Bahan Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.765.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.591.500,- atau 99,50% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Hasil Musrembang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp.29.407.500,- atau 94,99% dari alokasi anggaran.
- Investigasi Data bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Drainase, Air Bersih dan Sanitasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.739.400,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Perencanaan/DED Keciaptakaryaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.410.000,- dan terealisasi sebesar Rp.124.730.000,- atau 99,46% dari alokasi anggaran.
- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.919.405.200,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Perencanaan/Database ke-PU-an, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.271.516.250,- dan terealisasi sebesar Rp.269.716.250,- atau 99,34% dari alokasi anggaran.
- Pameran Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.000.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

r. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciaptakaryaan

Program ini bertujuan peningkatan sarana dan prasarana keciaptakaryaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.775.205.082,97 dan terealisasi sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.69.418.448.931,37 atau 87,02% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Rehabilitasi Sedang / Berat Fasilitas Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.350.203.354,08 dan terealisasi sebesar Rp.22.324.747.497,45 atau 91,68% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Penataan Pedestrian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.533.486.681,53 dan terealisasi sebesar Rp.26.834.112.329,30 atau 87,88% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.383.840.547,36 dan terealisasi sebesar Rp.16.823.649.954,62 atau 78,67% dari alokasi anggaran.
- Bantuan Rehabilitasi Sedang / Berat Fasilitas Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.507.674.500,- dan terealisasi sebesar Rp.3.435.939.150,- atau 97,95% dari alokasi anggaran.

s. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih / Air Minum

Program ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan pengairan serta daya dukung sumber daya air jaringan irigasi melalui Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.487.789.946,- dan terealisasi sebesar Rp.5.441.038.886,- atau 99,15% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.924.144.946,- dan terealisasi sebesar Rp.924.144.945,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih/Air Minum (DAK-REG), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.055.356.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.031.320.744,- atau 98,83% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih/Air Minum (DAK-Penugasan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.508.289.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.485.573.197,- atau 99,09% dari alokasi anggaran.

t. Program Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan peningkatan sehat perumahan melalui kegiatan Pengadaan Sanitasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.119.494.500,- dan terealisasi sebesar Rp.4.119.314.500,- atau 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Sanitasi (DAK) Regular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.057.022.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Sanitasi DAK Regular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.941.500,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sanitasi (DAK) Penugasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Sanitasi DAK Penugasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.531.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.351.000,- atau 99,32% dari alokasi anggaran.

u. Program Pengembangan Perumahan

Program ini bertujuan untuk pembangunan bidang perumahan, melalui kegiatan Pengadaan Konstruksi Jalan (Jalan Lingkungan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.245.304.917,- dan terealisasi sebesar Rp.2.244.331.878,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.

v. Program Kabupaten Sehat

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi Kabupaten Gowa yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja, melalui kegiatan Biaya Operasional Program Kabupaten Sehat, dengan alokasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

anggaran sebesar Rp.70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.69.400.000,- atau 99,14% dari alokasi anggaran.

w. Program Pendamping Kegiatan

Program ini bertujuan mendukung peningkatan pencapaian pelaksanaan pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan kelancaran kegiatan sarana dan prasarana, melalui kegiatan WISMP LOAN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.462.327.78,- dan terealisasi sebesar Rp.461.940.288,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung program/kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang direncanakan akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.323.690.170.229,19 dan terealisasi sebesar Rp.311.505.932.686,93 atau 96,24% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.886.667.615,80 dan terealisasi sebesar Rp.9.602.518.160,00 atau 97,13% dari alokasi anggaran.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan yang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukkan lahan yang berwawasan lingkungan, nyaman, sehat dan aman.

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri



Sipil sebanyak 34 orang dengan 12 jabatan struktural yang diisi oleh 12 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

a. Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.375.968.907,- dan terealisasi sebesar Rp.364.938.258,- atau 97,07% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.38.564.176,- atau 93,15% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.800.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.177.500,- dan terealisasi sebesar Rp.173.990.700,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.591.407,- dan terealisasi sebesar Rp.143.583.382,- atau 94,72% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.118.639.681,- dan terealisasi sebesar Rp.108.618.296,- atau 91,55% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pembangunan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp.21.472.900,- atau 72,99% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.926.681,- dan terealisasi sebesar Rp.29.852.396,- atau 93,50% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.293.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja aparat melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.016.000,- atau 99,91% dari alokasi anggaran.



e. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.568.751.400,- dan terealisasi sebesar Rp.1.516.916.000,- atau 96,70% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.413.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.913.000,- atau 51,52% dari alokasi anggaran.
- Verifikasi PSU Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.666.900,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Identifikasi / Pendataan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.296.902.900,- dan terealisasi sebesar Rp.295.237.500,- atau 99,44% dari alokasi anggaran.
- Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.643.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.610.500,- atau 99,78% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.348.400,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.192.500,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase dalam Mendukung Program Kota Tanpa Kumuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.808.815.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Database Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.947.200,- dan terealisasi sebesar Rp.42.247.200,- atau 61,27% dari alokasi anggaran.
- Pameran Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.572.500,- dan terealisasi sebesar Rp.42.635.000,- atau 97,85% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni / BSPS (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.250.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang direncanakan akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.2.107.389.988,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.034.488.554,00 atau 96,54% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang direncanakan akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.776.588.274,41,- dan terealisasi sebesar Rp.2.622.809.953,00 atau 94,46% dari alokasi anggaran.

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang sebelumnya merupakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran adalah organisasi pelaksana urusan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 78 orang dengan 29 jabatan struktural yang diisi oleh 29 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.637.248.291,- dan terealisasi sebesar Rp.636.147.307,- atau 99,83% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.509.326,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.38.921.516,- atau 99,04% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.770.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.860.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.551.500,- dan terealisasi sebesar Rp.53.379.000,- atau 99,68% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.504.257.465,- dan terealisasi sebesar Rp.503.707.465,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.530.317.750,- dan terealisasi sebesar Rp.524.975.071,- atau 98,99% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.725.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.898.300,- atau 98,73% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.229.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.239.393.250,- dan terealisasi sebesar Rp.234.302.271,- atau 97,87% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.770.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.850.000,- atau 99,70% dari alokasi anggaran.



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.315.520.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.191.625.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113.895.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.159.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.153.158.000,- atau 96,17% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini bertujuan meningkatkan pengamanan dan pengelolaan tempat bersejarah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.753.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.534.475.000,- atau 96,19% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.466.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.264.895.000,- atau 96,32% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.195.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp.177.980.000,- atau 90,86% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta penanggulangan kriminalitas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.422.196.250,- dan terealisasi sebesar Rp.416.742.065,- atau 98,71% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.375.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.369.745.815,- atau 98,55% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kapasitas Aparat dan Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.607.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.389.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemeliharaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa melalui kegiatan Pengembangan Keterampilan Seni Musik/Korps Musik (korsik), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



h. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.30.480.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan. Pengawasan dan Penyuluhan Perda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.480.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini melalui kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.110.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

j. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Upaya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.552.934.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.457.299.800,- atau 93,84% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemberdayaan Posko Pemadam Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.229.135.600,- dan terealisasi sebesar Rp.1.136.500.600,- atau 92,46% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.620.200,- dan terealisasi sebesar Rp.39.620.200,- atau 92,96% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.127.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.051.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang direncanakan akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.9.487.217.091,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.154.307.243,00 atau 96,49% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang direncanakan akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.091.871.592,87 dan terealisasi sebesar Rp.5.795.479.292,00 atau 95,13% dari alokasi anggaran.

6. URUSAN SOSIAL

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa sebagai institusi yang disertai tugas Urusan Sosial telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 46 orang dengan 33 jabatan struktural yang diisi oleh 33 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan dan Realisasi Tahun 2019**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.968.271.273,10 dan terealisasi sebesar Rp.933.481.954,00 atau 96,41% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.042.973,10 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.742.469,- atau 49,65% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.820.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.050.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.385.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.587.500,- dan terealisasi sebesar Rp.205.056.441,- atau 99,74% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.570.535.800,- dan terealisasi sebesar Rp.562.386.044,- atau 98,57% dari alokasi anggaran.



b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.422.176.700,- dan terealisasi sebesar Rp.416.400.610,- atau 98,63% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.244.376.700,- dan terealisasi sebesar Rp.238.853.410,- atau 97,74% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.96.747.200,- atau 99,74% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.940.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.840.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.100.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program ini bertujuan untuk menyusun laporan dan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.750.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.640.699.500,- dan terealisasi sebesar Rp.589.459.600,- atau 92,00% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyuluhan Pembentukan KUBE, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.71.592.000,- atau 99,09% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.114.385.600,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Pemuktahiran Basis Data Terpadu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.326.989.500,- dan terealisasi sebesar Rp.277.622.000,- atau 84,90% dari alokasi anggaran.
- Layanan dan Rujukan Terpadu Bagi Warga Miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp.125.860.000,- atau 99,06% dari alokasi anggaran.

f. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

alokasi anggaran sebesar Rp.238.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp.229.616.000,- atau 96,44% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Center Termasuk bagi Korban Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.64.911.000,- atau 88,92% dari alokasi anggaran.
- Jaminan Sosial Lanjut Usia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.74.905.000,- atau 99,50% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penjangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para penyandang cacat dan trauma melalui kegiatan Pembinaan Difabel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.240.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.239.079.000,- atau 99,50% dari alokasi anggaran.

h. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo, melalui kegiatan Pembinaan Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.50.230.000,- atau 99,90% dari alokasi anggaran.

i. Program Pembinaan dan Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapinada, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan penanggulangan penyakit masyarakat, melalui kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, dengan



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

alokasi anggaran sebesar Rp.49.590.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

j. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan melakukan pembinaan terhadap lembaga sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.643.796.000,- dan terealisasi sebesar Rp.605.303.650,- atau 94,02% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelaksanaan SKBKT Tk, Kabupaten Gowa dan Fasilitasi Kontingen Karang Taruna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.490.000,- atau 72,60% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Karang Taruna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.280.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis Tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.470.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Operasional Tenaga PSKS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.556.556.000,- dan terealisasi sebesar Rp.528.063.650,- atau 94,88% dari alokasi anggaran.

k. Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan/Kejuangan

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan peran aktif masyarakat agar dapat meningkatkan dan mengembangkan nilai rasa persaudaraan kepahlawanan dan kejuangan antar sesama, sebagai usaha untuk memberikan motivasi dan edukasi kepada masyarakat dalam usaha peningkatan rasa kepahlawanan, keberintisan, kejuangan, kesetiakawanan dan retorasi sosial dan mewujudkan penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa pahlawan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.114.248.400,- dan terealisasi sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.1.105.248.400,- atau 99,19% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Termasuk Jasa petugas Kebersihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.958.038.400,- dan terealisasi sebesar Rp.949.538.400,- atau 99,11% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Nilai-nilai Kejuangan dan Kepahlawanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.710.000,- dan terealisasi sebesar Rp.146.210.000,- atau 99,66% dari alokasi anggaran.
- Apel Besar Renungan Suci, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

l. Program Pembinaan Keagamaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keagamaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.501.546.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.404.166.000,- atau 96,11% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pencerahan Qalbu Jum'at Ibadah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.672.331.000,- dan terealisasi sebesar Rp.637.731.000,- atau 94,85% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Guru Mengaji, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.249.240.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Amaliah Ramadhan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.850.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Syiar Islam dalam Penghayatan Budaya Islam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.278.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp.263.040.000,- atau 94,61% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Da'i, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.660.000,- atau 99,54% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pemberdayaan Imam Masjid, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.317.350.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.222.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.219.280.000,- atau 98,65% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Seleksi Tilawati Qur'an (STQ) dan Mushabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.390.000,- dan terealisasi sebesar Rp.138.390.000,- atau 76,29% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Tauziah, Dzikir dan Doa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.660.000,- dan terealisasi sebesar Rp.193.160.000,- atau 99,23% dari alokasi anggaran.
- Festival Beduq, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.465.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

m. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kebencanaan

Program ini bertujuan mendorong kawasan pemulihan terdampak bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.100.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Stimulasi Rehabilitasi Pasca Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.050.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Identifikasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.050.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



***n. Program Peningkatan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana***

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.499.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembentukan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.979.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.520.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

o. Program Peningkatan Koordinasi Penyelamatan Korban Bencana Alam

Program ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini serta koordinasi dalam penyelamatan korban bencana alam, melalui kegiatan Koordinasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.109.800.000,- atau 99,82% dari alokasi anggaran.

p. Program Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan yang bersifat darurat dan peningkatan penyiapan Logistik Kebencanaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.530.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Kualitas Peralatan dan Logistik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.780.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kualitas / Pemberdayaan Pos Komando dan Tim Reaksi Cepat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.750.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Sosial yang direncanakan akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.7.296.787.373,10 dan terealisasi sebesar Rp.7.050.194.714,00 atau 96,62% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.415.922.075,95 dan terealisasi sebesar Rp.4.319.267.223,00 atau 97,81% dari alokasi anggaran.

1.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, sebagai instansi yang menangani Urusan Tenaga Kerja telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 14 jabatan struktural yang diisi oleh 14 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. **Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.291.124.200,- dan terealisasi sebesar Rp.276.069.131,- atau 94,83% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.797.000,- dan terealisasi sebesar Rp.27.969.472,- atau 72,09% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.291.000,- dan terealisasi sebesar Rp.61.482.000,- atau 97,14% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.985.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.090.000,- atau 56,18% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113.668.500,- dan terealisasi sebesar Rp.113.659.959,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.882.700,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.137.837.980,- atau 94,15% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.470.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.684.800,- atau 95,80% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.100.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp.81.653.180,- atau 92,34% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.400.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp.56.048.000,- atau 96,64% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.448.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp.28.600.000,- atau 93,62% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.785.500,- dan terealisasi sebesar Rp.22.777.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.820.400,- dan terealisasi sebesar Rp.14.812.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Profil Ketenaga Kerjaan dan Ketransmigrasian Kab. Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.965.100,- dan terealisasi sebesar Rp.7.965.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki keahlian, keterampilan dan kompetensi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.696.500,- dan terealisasi sebesar Rp.89.426.500,- atau 99,70% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Menjahit Dasar Bagi Pencari Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.800.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.936.000,- dan terealisasi sebesar Rp.33.666.000,- atau 99,20% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.960.500,- dan terealisasi sebesar 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan menciptakan meningkatkan kesempatan kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.238.878.500,- dan terealisasi sebesar Rp.233.795.500,- atau 97,87% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.344.000,- dan terealisasi sebesar Rp.58.979.000,- atau 94,60% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pembekalan Wirausaha Baru Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.484.500,- dan terealisasi sebesar Rp.41.814.500,- atau 96,16% dari alokasi anggaran.
- Bursa Kerja / Job Fair, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.133.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp.133.002.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.

g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan menciptakan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.725.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyuluhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.799.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Wokshop Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.240.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyuluhan Dalam Rangka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.616.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur Skala Upah di Perusahaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.070.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja yang direncanakan akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.1.811.215.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.749.358.222,00 atau 96,58% dari alokasi anggaran.



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.374.158.894,40 dan terealisasi sebesar Rp.3.122.142.182,00 atau 92,53% dari alokasi anggaran.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 15 orang dengan 12 jabatan struktural yang diisi oleh 12 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.365.706.000,- dan terealisasi sebesar Rp.325.920.420,- atau 89,12% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.279.920,- atau 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp.32.585.000,- atau 99,10% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182.589.500,- dan terealisasi sebesar Rp.145.519.000,- atau 79,70% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.556.500,- dan terealisasi sebesar Rp.125.136.500,- atau 98,10% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.87.650.500,- atau 99,72% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.750.500,- atau 98,81% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat, melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.100.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.100.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

e. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan pemahaman gender khususnya kepada kaum perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113.827.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Potensi Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penguatan Kelembagaan PUG, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.150.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelompok Usaha Produktif Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.981.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Puspaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.571.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Manajemen Organisasi Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.125.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini bertujuan meningkatkan keamanan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui kegiatan Pelatihan Pendampingan Kasus Perempuan dan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.300.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.952.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Kegiatan Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis PPRG, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.280.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Kelompok Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.537.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Sosialisasi Puspa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.981.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Fasilitator PUG, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.153.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak dan perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.145.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelatihan Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.835.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Workshop Bullying, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.030.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penguatan Forum Anak Kab. Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.280.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.953.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.912.994.920,00 atau 95,80% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.380.614.864,29 dan terealisasi sebesar Rp.1.353.045.356,00 atau 98,00% dari alokasi anggaran.



3. URUSAN PANGAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Gowa, oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Ketahanan Pangan sebagai instansi teknis pelaksana Urusan Pangan, telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 orang dengan 17 jabatan struktural yang diisi oleh 17 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program ini bertujuan mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.337.809.900,- dan terealisasi sebesar Rp.333.416.050,- atau 98,70% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.474.150,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.200.000,- atau 80,00% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.068.750,- dan terealisasi sebesar Rp.38.064.900,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.276.167.000,- dan terealisasi sebesar Rp.272.077.000,- atau 98,52% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.179.600,- dan terealisasi sebesar Rp.47.678.400,- atau 98,96% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.298.800,- atau 96,37% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.499.600,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.880.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.550.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.204.500,- dan terealisasi sebesar Rp.33.186.500,- atau 99,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.162.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.144.000,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.583.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.459.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan ketahanan pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.708.504.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.830.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.276.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan dan Pemantauan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.460.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga Pangan Strategis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.360.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemantauan Harga Pangan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.460.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan dan Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.580.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pertemuan Koordinasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.145.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pertemuan Koordinasi Dewan Pangan Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.327.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga Pangan Pokok, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.710.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.625.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemantauan Ketersediaan Pangan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.730.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Lumbung Pangan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



f. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi masyarakat secara kualitas dan kuantitas, sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.281.433.500,- dan terealisasi sebesar Rp.281.245.500,- atau 99,93% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengujian dan Penerapan Standar Mutu Pangan Segar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.829.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Food Security and vulnerability Atlas (FSVA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.060.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.967.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga Bebas Organik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.558.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.603.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi dan Penyuluhan Keamanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.505.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.317.000,- atau 99,08% dari alokasi anggaran.
- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.482.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Surveilans dan Pengawasan Keamanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.475.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Sosialisasi Beragam. Bergizi. Seimbang dan Aman (B2SA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.473.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Promosi dan Sosialisasi dan Pengankaraman Komsumsi Pangan yang Beragam. Bergizi. Seimbang dan Aman (B2SA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.835.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelompok Wanita Tani Penerima Manfaat Kawasan Rumah Pangan Lestari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.164.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemantauan dan Analisa Penyusunan Neraca Bahan Makan (NBM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.480.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan urusan Pangan yang direncanakan akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.1.453.632.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.448.530.950,00 atau 99,65% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.686.630.844,46 dan terealisasi sebesar Rp.2.567.696.377,00 atau 95,57% dari alokasi anggaran.

4. URUSAN PERTANAHAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Gowa sebagai institusi yang menangani urusan pertanahan telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Urusan pertanahan didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang dengan 3 jabatan



struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural serta dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**
a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.408.960.223,- dan terealisasi sebesar Rp.158.132.450,- atau 38,67% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.842.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.737.000,- atau 99,56% dari alokasi anggaran.
- PENSERTIFIKATAN TANAH, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.384.118.223,- dan terealisasi sebesar Rp.134.395.450,- atau 34,99% dari alokasi anggaran.
- Pembebasan Tanah Untuk Pemda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%.**

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Pertanahan yang direncanakan akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.408.960.223,- dan terealisasi sebesar Rp.158.132.450,- atau 38,67% dari alokasi anggaran.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa sebagai instansi yang menangani urusan lingkungan hidup telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.



• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.636.514.800,- dan terealisasi sebesar Rp.625.819.227,- atau 98,32% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp.33.370.928,- atau 81,63% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.261.000,- dan terealisasi sebesar Rp.77.259.899,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.104.814.600,- atau 97,05% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.323.565.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.408.800,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.938.844,50 dan terealisasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp160.737.096,00 atau 99,26% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.76.563.500,- dan terealisasi sebesar Rp.76.162.590,- atau 99,48% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Meubeler, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.480.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.700.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.095.344,50,- dan terealisasi sebesar Rp.39.294.506,00 atau 98,00% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.100.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.717.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.675.000,- atau 99,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.342.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.336.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.



- Penyusunan Renstra. Renja dan RKA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.339.000,- atau 99,82% dari alokasi anggaran.

e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan di lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.157.800.500,- dan terealisasi sebesar Rp.138.388.800,- atau 87,70% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemantauan Kualitas Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.832.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.085.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan B3 dan Limbah B3, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.035.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengkajian Dampak Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.556.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.292.000,- dan terealisasi sebesar Rp.81.880.300,- atau 80,84% dari alokasi anggaran.

f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk peningkatan perlindungan serta konservasi sumber daya alam melalui kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.805.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.256.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.730.700,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.241.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.284.300,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini bertujuan mengendalikan polusi terutama melalui serangkaian pengujian kadar polusi limbah padat, limbah cair dan udara, serta pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi melalui kegiatan Pengujian Kadar Limbah Padat dan Limbah Cair, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.665.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk mengendalikan dampak pembangunan sampah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.392.202.600,- dan terealisasi sebesar Rp,- atau 97,98% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan:



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.950.932.500,- dan terealisasi sebesar Rp,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Parasarana dan Sarana Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.881.744.600,- dan terealisasi sebesar Rp,- atau 99,77% dari alokasi anggaran.
- Jasa Pengelolaan Kebersihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.525.590.400,- dan terealisasi sebesar Rp,- atau 94,69% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.760.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.747.173.000,- dan terealisasi sebesar Rp,- atau 97,99% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.002.100,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, bersih, indah dan nyaman melalui kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.334.447.000,- dan terealisasi sebesar Rp.334.442.750,- atau 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung program/kegiatan Urusan Lingkungan Hidup yang direncanakan akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.11.884.247.244,50 dan terealisasi sebesar Rp.11.643.311.423,40 atau 97,97% dari alokasi anggaran.



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.151.791.110,57 dan terealisasi sebesar Rp.3.007.440.190,00 atau 95,42% dari alokasi anggaran.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa sebagai institusi yang diserahi tugas administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, telah memprogramkan berbagai kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.262.386.633,30 dan terealisasi sebesar Rp.1.162.727.070,00 atau 92,11% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.68.118.375,- atau 78,30% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.636.770,- atau 83,66% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp.78.954.000,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.986.327,30 dan terealisasi sebesar Rp.89.894.260,- atau 99,90% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.027.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.370.000,- atau 99,64% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.165.306,- dan terealisasi sebesar Rp.105.201.665,- atau 92,15% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.855.068.000,- dan terealisasi sebesar Rp.786.125.000,- atau 91,94% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.378.562.171,- dan terealisasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.361.814.045,- atau 95,58% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.168.562.171,- dan terealisasi sebesar Rp.156.681.501,- atau 92,95% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.84.686.544,- atau 95,37% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.104.246.000,- atau 99,28% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.104.625.000,- atau 98,33% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.300.000,- atau 75,37% dari alokasi anggaran.

e. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini bertujuan meningkatkan administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.125.854.000,- dan terealisasi sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.2.080.886.736,- atau 97,88% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.303.151.131,- dan terealisasi sebesar Rp.289.166.418,- atau 95,39% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.306.800,- atau 99,32% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.120.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%**.
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.809.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Buku Profil Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.819.000,- dan terealisasi sebesar Rp.50.063.000,- atau 98,51% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Keliling Akta Catatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.218.500,- dan terealisasi sebesar Rp.65.028.000,- atau 99,71% dari alokasi anggaran.
- Perekaman KTP Elektrik Offline bagi Penduduk yang Belum Melakukan Perekaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.028.500,- dan terealisasi sebesar Rp.173.636.500,- atau 99,20% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Dokumen dan Fasilitasi Kependudukan (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.282.482.369,- dan terealisasi sebesar Rp.1.277.835.474,- atau 99,64% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Administrasi Kependudukan (Pameran/Event/ Expo/Media), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.49.986.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.

- Sosialisasi Pencatatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.281.500,- dan terealisasi sebesar Rp.45.715.544,- atau 98,78% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Buku Agregat Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.843.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.795.000,- atau 99,72% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Perangkat SIAK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kerjasama Lintas Sektor Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.850.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.795.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang direncanakan akan dicapai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.3.893.502.804,30 dan terealisasi sebesar Rp.3.725.352.851,00 atau 95,68% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dialokasikan juga anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.721.775.584,43 dan terealisasi sebesar Rp.2.678.576.132,00 atau 98,41% dari alokasi anggaran.



7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Untuk menjawab tuntutan masyarakat akan peran dan fungsi masyarakat sebagai *stakeholder* pemerintahan, sebagai subyek dan obyek pemerintahan dan pembangunan telah dilakukan berbagai program/kegiatan urusan wajib urusan pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instansi teknis pelaksana. Dengan dukungan personil Pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 Orang dengan 16 jabatan struktural yang diduduki oleh 16 orang pejabat. Sarana dan prasarana yang memadai juga mendukung terciptanya pencapaian urusan ini.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.394.136.841,- dan terealisasi sebesar Rp.394.069.341,- atau 99,98% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.169.241,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.951.800,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.356.600,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.237.769.200,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp.79.822.500,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.525.100,- dan terealisasi sebesar Rp.74.232.540,- atau 99,61% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.867.440,- atau 98,30% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.565.100,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.350.000,- atau 99,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.950.000,- atau 99,00% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menyusun laporan dan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.945.800,- dan terealisasi sebesar Rp.56.445.800,- atau 95,76% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pedesaan sebagai obyek dan subyek pemerintahan dan pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.656.252.400,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.038.400,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis dan Kader PKK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.332.550.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kerja Sama Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.275.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Program PKK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.189.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lembaga ekonomi di pedesaan melalui kegiatan Pembinaan Kelembagan Usaha Ekonomi Desa, dengan alokasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

anggaran sebesar Rp.27.124.900,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.158.683.100,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Kegiatan Lomba Inovasi TTG, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Reflikasi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.090.683.100,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.246.432.700,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.165.200,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.141.795.100,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Penataan Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.472.400,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Alokasi anggaran program/kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.4.635.500.841,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.632.590.781,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.040.294.156,28 dan terealisasi sebesar Rp.1.677.905.866,00 atau 82,24% dari alokasi anggaran.

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 37 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 20 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.513.705.579,- dan terealisasi sebesar Rp.501.557.900,- atau 97,64% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp.47.674.050,- atau 97,85% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.600.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.873.100,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.240.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.250.000,- atau % dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.270.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.232.201.479,- dan terealisasi sebesar Rp.221.649.850,- atau % dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.99.807.170,- atau 99,56% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.650.000,- atau 99,61% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.62.257.170,- atau 99,45% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.27.486.000,- atau 99,05% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.350.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.136.000,- atau 99,00% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.980.000,- atau 93,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.11.795.000,- atau 92,51% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.185.000,- atau 99,53% dari alokasi anggaran.

e. Program Pelayanan Kontrasepsi

Program ini bertujuan meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.280.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Bimtek Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis Pelayanan KBPP di Fasyankes, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.880.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Peningkatan Fungsi dan Jaringan KB

Program ini bertujuan meningkatkan fungsi dan jaringan lembaga pelayanan keluarga berencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.915.900,- dan terealisasi sebesar Rp.240.515.900,- atau 99,01% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Bakti Sosial TNI KB-Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.110.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bulan Bakti Bhayangkara KB-Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.013.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bulan Bakti IBI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.635.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Bulan Bakti Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.935.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis R/R Dallap KKBPK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.240.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Analisa dan Umpan Balik Program KKBPK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Dampak Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.412.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimtek Pendataan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimtek Pengendalian Penduduk di daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.946.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemutahiran Data Keluarga dan Peserta IKB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.786.300,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Validasi Data Basis Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.727.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Review Pelaksanaan Program KKBPK di Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.504.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pertemuan Lintas Sektor DWG dan Tokoh Prog KKBPK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.756.600,- dan terealisasi sebesar Rp.34.356.600,- atau 93,47% dari alokasi anggaran.

g. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam pemberian pelayanan KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.224.373.500,-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Bimbingan Teknis Pengurus Kelompok UPPKS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.906.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita. Anak dan Lansia (POKTAN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.038.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (Poktan)/ PIK Remaja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.462.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Honor Tenaga Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) bagi PPKBD dan Sub PPKBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.158.300.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Kelompok UPPKS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.667.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya melalui kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Pengurus PIK Remaja/Mahasiswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.895.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Program Penggerakan KIE mengenai KKBPK bagi Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan data dan informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.810.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Temu Kader (IMP) bagi PPKBD dan Sub PPKBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.480.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Peran dan Kompetensi Kader IMP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan KIE melalui Mupen dan Media Elektronik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.730.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

j. Program DAK Bidang Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan serta tugas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.734.168.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.641.663.295,- atau 94,67% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembangunan / Alih Fungsi / Pengembangan Balai Penyuluhan KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.746.668.000,- dan terealisasi sebesar Rp.741.082.735,- atau 99,25% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sarana Prasarana Klinik KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.83.930.000,- atau 95,92% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.900.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.816.650.560,- atau 90,74% dari alokasi anggaran.

k. Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk peningkatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.630.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.616.610.500,- atau 99,70% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.440.000.000,- dan



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

teralisasi sebesar Rp.1.438.770.000,- atau 99,91% dari alokasi anggaran.

- Biaya Operasional Kampung KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.710.000.000,- dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Distribusi Alat kontrasepsi ke Fasyankes, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.500.000,- dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Operasional KIE Oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.002.000.000,- dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.432.140.000,- dan teralisasi sebesar Rp.419.340.500,- atau 97,04% dari alokasi anggaran.

l. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program ini melalui kegiatan Workshop Bina Keluarga Lansia (BKL), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.489.000,- dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.

m. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Program ini melalui kegiatan Pembinaan Kampung KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.627.500,- dan teralisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang direncanakan akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.8.666.854.479,00 dan teralisasi sebesar Rp.8.544.095.765,00 atau 98,58% dari alokasi anggaran.



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung, melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.525.145.248,18 dan terealisasi sebesar Rp.3.282.714.790,00 atau 93,12% dari alokasi anggaran.

9. URUSAN PERHUBUNGAN

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Secara umum, kebijakan pembangunan di urusan perhubungan di Kabupaten Gowa diarahkan dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas sehingga diharapkan akan mendukung distribusi barang serta mobilitas penduduk untuk melakukan aktivitas sosial ekonominya. Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melakukan pembangunan di urusan perhubungan telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 67 orang dengan 16 jabatan struktural yang diisi oleh 16 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.314.734.472,50 dan terealisasi sebesar Rp.311.306.294 atau 98,91% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.000.983,50 dan terealisasi sebesar Rp.41.872.507,- atau 95,16% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.880.000,- atau 99,49% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.077.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.824.500,- atau 97,55% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.752.417,- dan terealisasi sebesar Rp.174.736.787,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Terminal dan Perpakiran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.994.072,- dan terealisasi sebesar Rp.38.992.500,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.803.100,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.997.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.238.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.685.800,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.882.300,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.72.500.000,- atau 99,18% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp.33.750.000,- atau 99,12% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp.33.750.000,- atau 99,12% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.45.792.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan Penyusunan Renja, RKA, Lakip dan Renstra, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.607.500,- dan terealisasi sebesar Rp.35.574.500,- atau 99,91% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.844.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.838.000,- atau 99,90% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.498.000,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.253.500,- dan terealisasi sebesar Rp.14.238.500,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.

f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.127.200,- dan terealisasi sebesar Rp.36.827.200,- atau 99,19% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.811.600,- dan terealisasi sebesar Rp.23.511.600,- atau 98,74% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.315.600,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program ini bertujuan menciptakan peningkatan daya dukung sarana dan prasarana tertib berlalulintas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.234.924.570,- dan terealisasi sebesar Rp.234.232.500,- atau 99,71% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.400.460,- dan terealisasi sebesar Rp.60.082.500,- atau 99,47% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Penguajian Kendaraan Bermotor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.524.110,- dan terealisasi sebesar Rp.174.150.000,- atau 99,79% dari alokasi anggaran.

h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan angkutan khususnya angkutan darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.047.125,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Forum LLAJ, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.892.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Angkutan Umum, Barang dan Angkutan Tambang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.405.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyuluhan bagi Sopir / Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.750.125,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan tertib berlalu lintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.141.194.650,- dan terealisasi sebesar Rp.140.519.650,- atau 99,52% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.802.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.502.000,- atau 98,40% dari alokasi anggaran.
- Pengamanan Lalu Lintas Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.271.200,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Survei Inventarisasi Perlengkapan Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.355.000,- atau 99,40% dari alokasi anggaran.
- Pengendalian dan Pengawasan Rutin LLAJ, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.905.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Car Free Day, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.113.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Goes To School, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.747.700,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan dan Pemasangan Cermin Lalu Lintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.925.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.625.000,- atau 98,41% dari alokasi anggaran.

j. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelaikan pemakaian kendaraan khususnya kendaraan roda dua melalui kegiatan Pengadaan Buku Uji dan Plat Uji Kendaraan Bermotor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.147.451.250,- dan terealisasi sebesar Rp.147.076.250,- atau 99,75% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan bidang perhubungan yang direncanakan akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.217.789.867,50 dan terealisasi sebesar Rp.1.211.678.619,00 atau 99,50% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.718.556.609,71 dan terealisasi sebesar Rp.5.046.409.229,00 atau 88,25% dari alokasi anggaran.



10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melakukan koordinasi komunikasi dan informasi terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa, telah merencanakan dan melaksanakan Program/Kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 12 jabatan struktural yang diisi oleh 11 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.348.728.630,- dan terealisasi sebesar Rp.335.421.480,- atau 96,18% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.796.250,- dan terealisasi sebesar Rp.13.779.100,- atau 99,88% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.415.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%.**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.11.209.500,- atau 56,76% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp.62.683.000,- atau 93,86% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.463.700,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.178.847.500,- dan terealisasi sebesar Rp.178.615.000,- atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.671.180,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.242.500,- dan terealisasi sebesar Rp.169.943.240,- atau 99,82% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.187.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.055.000,- dan terealisasi sebesar Rp.89.755.740,- atau 99,67% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.33.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp.53.292.000,- atau 99,63% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.085.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.502.000,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.885.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.705.000,- atau 97,97% dari alokasi anggaran.

e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi, informasi dan media massa dan kualitas komunikasi, informasi dan media massa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.261.291.491,- dan terealisasi sebesar Rp.1.260.315.150,- atau 99,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.786.150,- dan terealisasi sebesar Rp.31.366.150,- atau 98,68% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kapasitas Koneksi Internet di SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.799.305.341,- dan terealisasi sebesar Rp.799.149.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Tower, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.247.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp.247.500.000,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.182.300.000,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.

f. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Program ini bertujuan meningkatkan kerjasama informasi dengan mas media, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.952.750,- dan terealisasi sebesar Rp.150.762.500,- atau 99,87% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyebarluasan Informasi Melalui Mobil Unit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.225.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Aplikasi Situs Website Pemerintah Kab. Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.88.130.000,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.
- Pameran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.527.750,- dan terealisasi sebesar Rp.50.407.500,- atau 99,76% dari alokasi anggaran.

g. Program Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Informasi

Program ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya berlalu lintas serta informasi lain seperti seni, dengan alokasi anggaran



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.304.787.760,- dan terealisasi sebesar Rp.301.343.760,- atau 98,87% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyebarluasan Informasi Melalui Radio, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.252.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp.248.586.000,- atau 98,63% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.413.880,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi PPID, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.293.880,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Komunikasi Publik melalui Dialog Interaktif Radio, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.050.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 adalah sebesar Rp.2.323.443.131,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.305.028.130,00 atau 99,21% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.746.266.749,85 dan terealisasi sebesar Rp.3.252.616.393,00 atau 86,82% dari alokasi anggaran.

11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani urusan koperasi, usaha kecil dan menengah telah melakukan berbagai program/kegiatan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri



Sipil sebanyak 23 orang dengan 16 jabatan struktural yang diisi oleh 15 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.823.018,40 dan terealisasi sebesar Rp178.972.282,00 atau 98,43% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp19.447.968,- atau 90,04% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.038.000,- dan terealisasi sebesar Rp53.339.314,- atau 98,71% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.390.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.795.018,40 dan terealisasi sebesar Rp1.795.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.



b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.002.000,- dan terealisasi sebesar Rp.108.495.870,- atau 97,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.612.500,- dan terealisasi sebesar Rp.39.279.000,- atau 99,16% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.889.500,- dan terealisasi sebesar Rp.53.716.870,- atau 96,11% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.750.000,- atau 98,72% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.500.000,- atau 98,64% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.250.000,- atau 98,78% dari alokasi anggaran.



d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.058.000,- dan terealisasi sebesar Rp.32.048.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.391.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.077.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.590.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.580.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.

e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Program ini bertujuan untuk penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp.103.786.746,- atau 98,11% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM yang Berdaya Saing, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.715.000,- dan terealisasi sebesar Rp.89.711.746,- atau 97,82% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kapasitas Usaha Melalui Kemasan Produk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.075.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan bantuan modal pada usaha industri rumah tangga dan UKM, dengan alokasi anggaran



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.43.663.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penerapan Standarisasi Tata Kelola Simpan Pinjam KSP/USP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.655.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan dan Pengelolaan Permodalan bagi KUKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.620.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penilaian Kesehatan KSP/USP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.388.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian dan daya saing koperasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.797.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penilaian Koperasi Berprestasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.477.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Kepatuhan Koperasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.525.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Kelembagaan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.795.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Program ini melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Kelompok Wirausaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.515.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp.497.674.200,- atau 96,46% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang direncanakan pada T.A. 2019 sebesar Rp.1.065.213.518,40 dan terealisasi sebesar Rp.1.039.187.598,00 atau 97,56% dari alokasi anggaran.



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.316.896.304,72 dan terealisasi sebesar Rp.2.190.935.377,00 atau 94,56% dari alokasi anggaran.

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

- ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa sebagai institusi baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 disertai tugas menangani urusan penanaman modal, telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- ***Program, Anggaran, Kegiatan dan Realisasi Tahun 2019***

- a. Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran***

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.528.927.850,- dan terealisasi sebesar Rp.526.651.318,- atau 99,57% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.136.400,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp.62.473.665,- atau 98,51% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.094.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.200.000,- atau 91,11% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.259.727.500,- dan terealisasi sebesar Rp.259.721.253,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.549.950,- dan terealisasi sebesar Rp.181.026.000,- atau 99,71% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.893.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.125.469.547,56 atau 98,10% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.28.094.617,56 atau 98,23% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.43.218.000,- atau 99,35% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.293.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp.43.413.430,- atau 96,37% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.450.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.016.750,- dan terealisasi sebesar Rp.6.971.750,- atau 99,36% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.260.000,- atau 98,26% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Rencana Penganggaran dan LAKIP SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.716.750,- dan terealisasi sebesar Rp.4.711.750,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.



e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan di berbagai sektor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.776.900,- dan terealisasi sebesar Rp.108.991.900,- atau 98,39% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.777.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan/Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan PMDN dan PMA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.162.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.027.000,- atau 99,16% dari alokasi anggaran.
- Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pameran dan Temu Usaha di Dalam dan Luar Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.73.000.000,- atau 97,99% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.337.400,- dan terealisasi sebesar Rp.11.187.400,- atau 98,68% dari alokasi anggaran.

f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.697.000,- dan terealisasi sebesar Rp.160.120.500,- atau 99,64% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan dan Pengolahan Data Penanaman Modal dan Perizinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.958.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.943.000,- atau 99,85% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.048.000,- dan terealisasi sebesar Rp.102.600.000,- atau 99,57% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Terpadu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.618.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.647.500,- dan terealisasi sebesar Rp.22.640.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Survey Kepuasan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.425.500,- dan terealisasi sebesar Rp.9.319.500,- atau 98,88% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan urusan Penanaman Modal yang direncanakan akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.960.712.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.953.605.015,56 atau 99,26% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.967.426.598,95 dan terealisasi sebesar Rp.2.870.536.569,00 atau 96,73% dari alokasi anggaran.

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang dengan 13



jabatan struktural yang diisi oleh 13 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

a. Program Pelayanan Umum Adminitrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.295.779.831,- dan terealisasi sebesar Rp.291.408.928,- atau 98,52% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.849.331,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.930.500,- dan terealisasi sebesar Rp.246.559.597,- atau 98,26% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.750.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.350.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui kegiatan Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.784.000,- dan terealisasi sebesar Rp.67.708.000,- atau 99,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.204.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.192.000,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan dan Pelaporan Asset Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp.28.108.000,- atau 99,82% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan dan Pelaporan Anggaran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.408.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dan pemuda, melalui kegiatan Rehabilitasi Gedung Pemuda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.333.611.733,- dan terealisasi sebesar Rp.283.164.460,- atau 84,88% dari alokasi anggaran.

f. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan serta mengarahkan pemuda ke hal-hal positif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.055.865.810,00 dan terealisasi sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.1.947.454.892,44 atau 94,73% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Aksi Bakti Sosial Kepemudaan (Paskibraka), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.443.344.810,- dan terealisasi sebesar Rp.442.560.542,44 atau 99,82% dari alokasi anggaran.
- Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda/PMI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.828.521.000,- dan terealisasi sebesar Rp.825.999.350,- atau 99,70% dari alokasi anggaran.
- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan / Wirausaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.239.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.234.850.000,- atau 98,26% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan kepemudaan (Pramuka), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.59.500.000,- atau 99,17% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Kemah Bakti Purna Paskibraka), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.385.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.384.545.000,- atau 99,88% dari alokasi anggaran.
- Pendidikan dan Pelatihan Kader Madya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%.**

g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini bertujuan untuk menggiatkan olahraga serta perbaikan organisasi dan manajemen olah raga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.518.124.448,- dan terealisasi sebesar Rp.516.521.648,- atau 99,69% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Mutu Organisasi dan Manajemen Olahraga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.617.400,- dan terealisasi sebesar Rp.71.212.400,- atau 99,43% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga antar Pelajar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.015.548,- dan terealisasi sebesar Rp.150.378.048,- atau 99,58% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Pekan Olahraga Antar Club, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.991.500,- dan terealisasi sebesar Rp.150.431.200,- atau 99,63% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.144.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang direncanakan akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.3.325.915.822,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.161.007.928,44 atau 95,04% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.703.807.521,80 dan terealisasi sebesar Rp.2.652.765.040,00 atau 98,11% dari alokasi anggaran.

14. URUSAN STATISTIK

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Komunikasi, Informastika, Statistik dan Persandian sebagai institusi yang disertai tugas Urusan Statistik telah merencanakan dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural.



• ***Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019***

a. ***Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah***

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan penelitian dan statistik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.324.600,- dan terealisasi sebesar Rp.18.315.800,- atau 99,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengumpulan dan Penyusunan Kompilasi Data Statistik Sektoral, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.158.800,- dan terealisasi sebesar Rp.2.150.000,- atau 99,59% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Statistik Sektoral, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.165.800,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

15. URUSAN PERSANDIAN

• ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai institusi yang diserahi tugas Urusan Persandian telah merencanakan dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• ***Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019***

a. ***Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi***

Program ini bertujuan menyediakan konektivitas dan jaringan yang handal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.884.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.810.000,- atau 99,59% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemenuhan Pengembangan SDM. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Operasional dan Pemeliharaan Persandian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.384.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.310.000,- atau 99,49% dari alokasi anggaran.

16. URUSAN KEBUDAYAAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa sebagai institusi yang disertai tugas Urusan Budaya telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 39 orang dengan 4 jabatan struktural yang diisi oleh 4 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Program ini bertujuan untuk Pengembangan Kekayaan Budaya Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.847.187.500,- dan terealisasi sebesar Rp.842.354.000,- atau 99,43% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.975.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.282.500,- dan terealisasi sebesar Rp.6.459.000,- atau 57,25% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.270.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.260.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Prosesi Upacara 17 Pasukan Ganti Jaga Tubarani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.309.660.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan kesenian melalui kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.450.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.300.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Atraksi Seni Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.150.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas nilai – nilai budaya daerah melalui kegiatan Pengelolaan Data Kesenian Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.721.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan yang direncanakan akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.974.358.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.969.525.000,00 atau 99,50% dari alokasi anggaran.



17. URUSAN PERPUSTAKAAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah institusi yang disertai tugas Urusan Perpustakaan telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Gowa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dengan 8 jabatan struktural yang diisi oleh 7 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. Program Pelayanan Umum Adminitrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata Penyediaan jasa surat menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.381.709.100,- dan terealisasi sebesar Rp.370.494.105,- atau 97,06% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.21.377.134,- atau 74,23% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.221.074.500,- dan terealisasi sebesar Rp.221.074.471,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.834.600,- dan terealisasi sebesar Rp.128.042.500,- atau 97,12% dari alokasi anggaran.



b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.149.416.401,- atau 97,43% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.464.200,- atau 88,73% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Meubeler, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.802.201,- atau 97,53% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.110.900.000,- atau 99,55% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.250.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.353.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.278.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.075.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.134.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Program ini bertujuan sebagai pembinaan perpustakaan pemkab Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.429.293.800,- dan terealisasi sebesar Rp.391.880.382,- atau 91,28% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.311.081.500,- dan terealisasi sebesar Rp.273.812.500,- atau 88,02% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.900.000,- atau 99,80% dari alokasi anggaran.
- Promosi Layanan Informasi Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.894.500,- dan terealisasi sebesar Rp.56.857.682,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Otomasi Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.317.800,- dan terealisasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.11.310.200,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan Urusan Perpustakaan yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.012.839.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.960.277.888,00 atau 94,81% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Wajib Bidang Perpustakaan yang direncanakan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.534.453.355,82 dan terealisasi sebesar Rp.1.332.811.744,00 atau 86,86% dari alokasi anggaran.

18. URUSAN KEARSIPAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai institusi yang diserahi tugas Urusan Kearsipan telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dengan 4 jabatan struktural yang diisi oleh 4 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. **Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**

Program ini bertujuan meningkatkan system administrasi kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.711.750,- dan terealisasi sebesar Rp.125.670.250,- atau 99,97% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Regulasi Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.319.750,- dan terealisasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.77.319.250,- atau 100% dari alokasi anggaran.

- Monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.392.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.351.000,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

Program ini bertujuan sebagai penunjang kegiatan Kearsipan Pemkab Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.992.350,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.467.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.525.100,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan Urusan Kearsipan yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.190.704.100,- dan terealisasi sebesar Rp.190.662.600,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.

2. RINGKASAN URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PERIKANAN

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Perikanan Kabupaten Gowa sebagai instansi teknis yang menangani Urusan Perikanan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sebagai dinas baru yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Dinas Perikanan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang dengan 15 jabatan struktural yang diisi oleh 15 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.



• ***Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019***

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata Penyediaan jasa surat menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.738.319,- dan terealisasi sebesar Rp.490.233.130,- atau 97,90% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.209.369,- dan terealisasi sebesar Rp.54.842.180,- atau 89,60% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.800.000,- atau 58,33% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.134.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.259.594.200,- dan terealisasi sebesar Rp.257.456.200,- atau 99,18% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.138.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp.137.955.075,- atau 99,48% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.47.820.200,- atau 98,60% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.690.000,- dan terealisasi sebesar Rp.54.654.875,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.480.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.750.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.750.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.502.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.060.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.275.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.167.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



e. Program Pendataan Statistik Perikanan

Program ini bertujuan penyusunan dan penyajian data statistik perikanan sehingga diketahui peningkatan produksi perikanan dalam pertahunnya melalui kegiatan Pendataan Produksi Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.175.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk peningkatan pengembangan perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.251.772.500,- dan terealisasi sebesar Rp.251.732.500,- atau % dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Produksi Balai Benih Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.027.500,- dan terealisasi sebesar Rp.74.987.500,- atau % dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Kemitraan Pembudidaya Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.176.745.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk peningkatan pengembangan perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.781.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Usaha Nelayanan Skala Kecil di Perairan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.927.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan TPI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.555.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Nelayan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.299.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



h. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program ini bertujuan meningkatkan produksi hasil budi daya perikanan, melalui kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.995.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.882.500,- atau 94,36% dari alokasi anggaran.

i. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Pembinaan Usaha

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.261.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan Produksi Bernilai Tambah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.922.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Gemar Makan Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.338.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

j. Program Pemberdayaan Sumber Daya Perairan Umum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan pemberdayaan ekosistem perikanan melalui kegiatan Perlindungan, Monitoring, Pengendalian dan Peningkatan Sumber daya Perairan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.910.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

k. Program Pemberdayaan Kelompok Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berprofesi di bidang perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.948.750,- dan terealisasi sebesar Rp.14.940.750,- atau 99,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Lomba Kinerja Kelompok Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.765.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.757.000,- atau 99,88% dari alokasi anggaran.



- Temu Koordinasi Kelompok Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.183.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

1. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.485.104.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.454.009.000,- atau 97,91% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.245.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.242.124.000,- atau 98,83% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Perikanan (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.240.104.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.211.885.000,- atau 97,72% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran program/kegiatan urusan perikanan yang direncanakan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.2.619.609.319,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.577.133.705,00 atau 98,38% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Urusan Perikanan yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.831.720.923,74 dan terealisasi sebesar Rp.2.724.905.556,00 atau 96,23% dari alokasi anggaran.



2. URUSAN PERTANIAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Gowa, oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagai instansi teknis pelaksana urusan pilihan bidang pertanian, telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 116 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Sedangkan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 71 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 20 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.915.206.989,10 dan terealisasi sebesar Rp.868.965.347,00 atau 94,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.90.668.475,- atau 73,18% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.61.456.722,- atau 98,96% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.721.800,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.950.000,- atau 99,64% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.294.802.000,- dan terealisasi sebesar Rp.293.404.500,- atau 99,53% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.370.683.189 dan terealisasi sebesar Rp.359.763.850,- atau 97,05% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.620.150,- dan terealisasi sebesar Rp.132.178.320,- atau 87,76% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.42.400.000,- atau 98,60% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.110.150,- dan terealisasi sebesar Rp.52.000.000,- atau 99,79% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.293.320,- atau 49,48% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.485.000,- atau 99,64% dari alokasi anggaran.



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.129.235.500,- atau 99,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.950.000,- atau 99,00% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.110.285.500,- atau 99,81% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.849.250,- dan terealisasi sebesar Rp.90.135.750,- atau 99,21% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.251.000,- dan terealisasi sebesar Rp.44.665.000,- atau 98,71% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.269.250,- dan terealisasi sebesar Rp.12.234.250,- atau 99,71% dari alokasi anggaran.
- Pembuatan Statistik Perencanaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.876.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.452.500,- dan terealisasi sebesar Rp.21.360.000,- atau 99,57% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan bidang tanaman pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.058.591.000,- dan terealisasi sebesar Rp.936.160.500,- atau 88,43% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi. Palawija, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.592.500,- dan terealisasi sebesar Rp.114.787.500,- atau 60,23% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Padi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.518.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.828.480.000,- dan terealisasi sebesar Rp.781.854.500,- atau 94,37% dari alokasi anggaran.

f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Hortikultura

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan bidang hortikultura, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.158.891.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Difersifikasi Tanaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.536.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Kentang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.225.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hias, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.130.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.920.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.830.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.090.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan prasarana dan sarana melalui kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.632.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Hortikultura

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan baru terkait penerapan teknologi pertanian tepat guna melalui kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.935.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan baru terkait penerapan teknologi pertanian tepat guna melalui kegiatan Pengembangan



Pemberdayaan PUAP dan UPPO, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.003.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

k. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kelestarian sumber daya pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.268.666.325,- dan terealisasi sebesar Rp.1.266.099.824,- atau 99,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.266.022.000,- dan terealisasi sebesar Rp.264.897.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.172.558.500,- atau 99,17% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkebunan (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.755.466.625,- dan terealisasi sebesar Rp.755.466.624,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.072.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.105.200,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

l. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan petani dan kelompok tani dalam pengolahan lahan pertanian melalui kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.842.500,- dan terealisasi sebesar Rp.75.092.500,- atau 99,01% dari alokasi anggaran.



m. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Prasarana dan Sarana

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan baru terkait penerapan teknologi pertanian tepat guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.663.199.750,- dan terealisasi sebesar Rp.1.654.157.750,- atau 99,46% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.632.799.750,- dan terealisasi sebesar Rp.1.623.757.750,- atau 99,45% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.224.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.175.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

n. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Perkebunan

Program ini bertujuan untuk menciptakan ketersediaan pangan dalam masyarakat, melalui kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.165.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

o. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

Program ini bertujuan meningkatkan pengolahan lahan pertanian dengan pola intensifikasi pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.277.500,- dan terealisasi sebesar Rp.65.277.500,- atau 95,61% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penerapan Teknologi Perkebunan Modern, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.955.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.955.000,- atau 91,16% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.322.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

p. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, melalui kegiatan Orientasi Teknis dan Lokakarya Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.286.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

q. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.099.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.297.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.497.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan dan Pembinaan Rumah Potong Hewan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.305.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

r. Program Peningkatan Hasil Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian di bidang peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.082.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pembinaan Ternak Bantuan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.308.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.606.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Perbibitan Hijauan Makanan Ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.583.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pendataan Statistik Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.584.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

s. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan baru terkait penerapan teknologi pertanian tepat guna, melalui kegiatan Penerapan Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.321.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

t. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi peternakan, melalui kegiatan Pembinaan Usaha Ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.293.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

u. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi peternakan, melalui kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.405.466.625,- dan terealisasi sebesar Rp.401.328.324,- atau 98,98% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.6.657.849.589,10 dan terealisasi sebesar Rp.6.450.260.815,00 atau 96,88% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.846.346.897,55 dan terealisasi sebesar Rp.16.101.295.171,00 atau 95,58% dari alokasi anggaran.

3. URUSAN PARIWISATA

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa sebagai instansi yang menangani bidang kepariwisataan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 39 orang dengan 15 jabatan struktural yang diisi oleh 15 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.303.732.145,60 dan terealisasi sebesar Rp.303.732.020,00 atau 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.224.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp.224.129.875,- atau 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.602.145,60 dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.711.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.911.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Displin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.957.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.933.000,- atau 99,87% dari alokasi anggaran.



e. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan informasi potensi obyek wisata, seni budaya dan adat istiadat masyarakat lokal kepada masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.292.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.292.290.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dalam Pemasaran Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.890.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.240.750.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.036.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.035.650.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Statistik Kepariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung obyek dan daerah tujuan wisata agar masyarakat akan lebih tertarik mengunjungi dan menikmati suguhan pagelaran seni budaya lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.265.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga / Dunia Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.740.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.525.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Pengembangan Kemitraan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan kerjasama pengembangan kepariwisataan dengan melibatkan masyarakat, akademisi, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan atau masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.521.736.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerja Sama dengan Lembaga Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.260.868.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.260.868.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran untuk seluruh Program/Kegiatan di urusan Pariwisata yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.2.250.041.145,60 dan terealisasi sebesar Rp.2.249.667.020,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.220.757.301,63 dan terealisasi sebesar Rp.3.093.336.058,00 atau 96,04% dari alokasi anggaran.



4. URUSAN PERDAGANGAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa sebagai institusi yang disertai tugas melakukan koordinasi perencanaan perdagangan, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang dengan 19 jabatan struktural yang diisi oleh 19 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.630.943.515,- dan terealisasi sebesar Rp.596.381.251,- atau 94,52% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.94.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.65.624.156,- atau 69,22% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.536.350,- atau 30,73% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.130.695.200,- dan terealisasi sebesar Rp.130.673.200,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.027.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.176.900,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.138.244.415,- dan terealisasi sebesar Rp.136.343.645,- atau 98,63% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.202.862.018,50 dan terealisasi sebesar Rp.192.173.193,00 atau 94,73% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.762.018,50 dan terealisasi sebesar Rp.23.135.040,- atau 89,80% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.70.438.153,- atau 89,73% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp.47.055.500,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.



d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.159.244.000,- dan terealisasi sebesar Rp.159.166.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.054.000,- dan terealisasi sebesar Rp.79.038.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.453.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.042.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.985.000,- atau 99,59% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.695.000,- dan terealisasi sebesar Rp.61.690.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.

e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan menciptakan perlindungan terhadap konsumen dari praktek-praktek perdagangan yang tidak sesuai dengan peraturan dan merugikan konsumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.477.172.200,- dan terealisasi sebesar Rp.1.329.722.200,- atau 90,02% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Tera/Tera Ulang/UTTP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.603.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengawasan serta Penataan Elpiji dan BBM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.269.200,- dan terealisasi sebesar Rp.23.169.200,- atau 99,57% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sarana UPTD Metrologi Legal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.394.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.246.950.000,- atau 89,43% dari alokasi anggaran.

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peluang pengembangan usaha masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.334.937.500,- dan terealisasi sebesar Rp.334.586.100,- atau 99,90% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan (Pameran), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.296.820.000,- dan terealisasi sebesar Rp.296.558.600,- atau 99,91% dari alokasi anggaran.
- Pendataan Komoditi Eksport dan Pemantauan Barang Impor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.117.500,- dan terealisasi sebesar Rp.38.027.500,- atau 99,76% dari alokasi anggaran.

g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan pemasaran dan daya saing produk lokal atau dalam negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.506.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelatihan Kewirausahaan yang Responsif Gender dan Disabilitas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.862.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Strategi Pengembangan Usaha Bagi Pelaku Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.201.300,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Sosialisasi Akses Permodalan dengan Pelaku Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.297.800,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Manajemen Pemasaran Produk Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.585.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Kemasan Produk bagi Pelaku IKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.375.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Workshop e-Commerce bagi IKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.184.400,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Program Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan

Program ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di bidang usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.862.853.400,- dan terealisasi sebesar Rp.3.840.493.368,- atau 99,42% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Operasional Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.608.552.400,- dan terealisasi sebesar Rp.604.196.400,- atau 99,28% dari alokasi anggaran.
- Pemantauan Saran dan Prasarana Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.249.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan / Pendataan Izin Usaha Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.690.000,- dan terealisasi sebesar Rp.41.689.998,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.884.532.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.866.527.970,- atau 99,38% dari alokasi anggaran.
- Uji Petik / Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target PAD melalui Retribusi Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.818.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Sosialisasi dan Penataan Pedagang Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.748.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Relokasi Pedagang Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.778.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Pasar Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.118.485.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan

Program ini melalui kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.553.200,- dan terealisasi sebesar Rp.31.460.700,- atau 99,71% dari alokasi anggaran.

j. Program Revitalisasi Melalui Pengembangan Agribisnis/ Agroindustri

Program ini melalui kegiatan Bantuan Alat/Mesin Industri Logam dan Mesin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.000.500,- dan terealisasi sebesar Rp.61.168.300,- atau 95,57% dari alokasi anggaran.

k. Program Peningkatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini bertujuan untuk meningkatkan proses distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat melalui kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Sembako, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.188.300,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

l. Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perdagangan komoditas asli daerah, melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Gudang (SRG) / Gudang Swasta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.755.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



**m. Program Revitalisasi Melalui Pengembangan
Agribisnis/ Agroindustri**

Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.177.100,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelatihan Pengenalan Dasar Aplikasi Bordir Sulam Kain, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.418.100,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelatihan Teknik Service Air Conditioning (AC), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.759.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran untuk seluruh Program/Kegiatan di urusan Perdagangan yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Gowa Kabupaten Gowa Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.7.171.252.733,50 dan terealisasi sebesar Rp.6.952.833.012,00 atau 96,95% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.727.623.866,60 dan terealisasi sebesar Rp.3.207.409.208,00 atau 86,04% dari alokasi anggaran.

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa sebagai instansi teknis yang diserahi tugas melakukan koordinasi perencanaan bidang perindustrian, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang dengan 4 jabatan struktural yang diisi oleh 4 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.



• ***Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019***

a. Program Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk pengrajin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.666.200,- dan terealisasi sebesar Rp.159.087.800,- atau 99,02% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Industri Kecil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.434.200,- dan terealisasi sebesar Rp.91.370.700,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Bantuan Alat Bagi Industri Kerajinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.232.000,- dan terealisasi sebesar Rp.67.717.100,- atau 97,81% dari alokasi anggaran.

b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pengolahan industri kecil dan menengah melalui kegiatan Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu dan Kualitas bagi Pelaku IKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.096.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Pengembangan Sentra-Sentra IKM yang Potensial

Program ini bertujuan untuk mengembangkan industri mikro menjadi industri kecil melalui kegiatan Pembentukan dan Penguatan Sentra Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.273.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini melalui kegiatan Pendataan dan Pengolahan Data Usaha Industri di Kabupaten Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.448.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pelatihan Aneka Produk Bahan Dasar Logam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.779.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Teknis Finishing Logam pada Alat Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.669.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian yang direncanakan akan dicapai dan telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.336.484.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.334.905.800,00 atau 99,53% dari alokasi anggaran.

6. URUSAN TRANSMIGRASI

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melakukan koordinasi perencanaan urusan Pilihan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Gowa, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan daerah permukiman transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.533.000,- dan terealisasi sebesar Rp.66.231.000,- atau 99,55% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp.46.703.000,- atau 99,36% dari alokasi anggaran.



- Pelatihan dan Pembinaan Warga Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.528.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan urusan Transmigrasi yang direncanakan akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.66.533.000,- dan terealisasi sebesar Rp.66.231.000,- atau 99,55% dari alokasi anggaran.

A. 2. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Barombong, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Manuju.

Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 139 orang dengan 48 jabatan struktural yang diisi oleh 48 pejabat struktural; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 39 orang dengan 17 jabatan struktural yang diisi oleh 15 pejabat struktural; 18 kecamatan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 516 termasuk Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di kelurahan dan bertindak selaku Sekretaris Desa. Jumlah seluruh jabatan struktural di 18 kecamatan adalah 392 jabatan struktural yang diisi oleh 313 pejabat.



• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.460.231.186,76 dan terealisasi sebesar Rp.22.648.014.197,00 atau 96,54% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp.42.724.503,- atau 86,71% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.349.849.861,36 dan terealisasi sebesar Rp.3.034.557.028,- atau 90,59% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.926.691.499,- dan terealisasi sebesar Rp.2.921.442.900,- atau 99,82% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.592.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp.589.492.290,- atau 99,54% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.106.324.825,- atau 87,87% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.811.447.000,- dan terealisasi sebesar Rp.729.269.950,- atau 89,87% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.265.148.960,- dan terealisasi sebesar Rp.1.212.543.334,- atau 95,84% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.328.334.670,- dan terealisasi sebesar Rp.291.278.710,- atau 88,71% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.436.353.600,- dan terealisasi sebesar Rp.435.732.750,- atau 99,86% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.137.482,- dan terealisasi sebesar Rp.152.652.200,- atau 99,68% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.259.512.000,- dan terealisasi sebesar Rp.259.198.000,- atau 99,88% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.343.731.000,- dan terealisasi sebesar Rp.342.747.150,- atau 99,71% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.160.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.872.609.160,- dan terealisasi sebesar Rp.5.870.388.460,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.356.307.500,- dan terealisasi sebesar Rp.342.079.610,- atau 96,01% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.673.077.474,40 dan terealisasi sebesar Rp.5.433.090.633,- atau 95,77% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Operasional Pelayanan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.750.000,- realisasi fisik dan keuangan 0%.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Pemerintahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.507.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.485.000,- atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.103.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Humas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.592.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.587.178.854,- atau 99,09% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Sub Bagian Perbendaharaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.430.480,- dan terealisasi sebesar Rp.131.391.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.615.500,- dan terealisasi sebesar Rp.60.824.000,- atau 98,72% dari alokasi anggaran.
- Pengumpulan Data, Penyusunan dan Pengadaan Buku Kerja kab, Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.350.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Medical Cek-Up Pimpinan Bupati/Wakil Bupati, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%**.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.163.600.091,88 dan terealisasi sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.11.994.569.190,00 atau 91,12% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembangunan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.44.320.000,- atau 98,49% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.135.535.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.134.214.500,- atau 99,88% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp.112.320.000,- atau 99,82% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.412.179.000,- dan terealisasi sebesar Rp.233.553.950,- atau 56,66% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp.182.439.000,- atau 91,01% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.420.945.515,- dan terealisasi sebesar Rp.1.379.540.230,- atau 97,09% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Meubeler, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.181.950.000,- atau 99,84% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.842.153.235,- dan terealisasi sebesar Rp.828.727.498,- atau 98,41% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.121.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.393.007.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.593.804.215,- atau 76,45% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.496.314.841,88 dan terealisasi sebesar Rp.4.395.080.583,- atau 97,75% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.288.406.000,- dan terealisasi sebesar Rp.275.460.214,- atau 95,51% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.224.418.000,- dan terealisasi sebesar Rp.222.738.000,- atau 99,25% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan semangat dan motivasi kerja aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.472.531.000,- dan terealisasi sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.1.431.802.000,- atau 97,23% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.767.446.000,- dan terealisasi sebesar Rp.760.327.000,- atau 99,07% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.64.628.000,- atau 76,94% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.493.942.000,- dan terealisasi sebesar Rp.489.802.000,- atau 99,16% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penunjang Kegiatan Seleksi Jabatan Perusahaan Daerah Holding Company, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.143.000,- dan terealisasi sebesar Rp.100.045.000,- atau 90,83% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.59.900.000,- atau 99,83% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.726.509.000,- dan terealisasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.706.062.600,- atau 97,19% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.742.500,- dan terealisasi sebesar Rp.101.164.500,- atau 94,77% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.792.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.749.501,- dan terealisasi sebesar Rp.5.749.500,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Renstra, Renja dan RKA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.678.604,- dan terealisasi sebesar Rp.86.710.000,- atau 97,78% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Laporan Data Kepegawaian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.515.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penatausahaan dan Pelaporan BMD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.261.795,- dan terealisasi sebesar Rp.73.114.000,- atau 97,15% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.805.500,- dan terealisasi sebesar Rp.42.789.500,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.251.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.241.115.000,- atau 95,95% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Informasi LPPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.937.600,- dan terealisasi sebesar Rp.51.655.600,- atau 99,46% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.026.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.757.000,- atau 98,97% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan dan Monev SAKIP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Program ini melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.824.634.000,- dan terealisasi sebesar Rp.822.963.628,- atau 99,80% dari alokasi anggaran.

g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi baik antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pemerintah dengan pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.371.400.601,- dan terealisasi sebesar Rp.1.008.155.000,- atau 73,51% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.749.518.000,- dan terealisasi sebesar Rp.736.430.500,- atau 98,25% dari alokasi anggaran.
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.621.882.601,- dan terealisasi sebesar Rp.271.724.500,- atau 43,69% dari alokasi anggaran.

h. Program Peningkatan Kegiatan Pemerintahan

Program ini bertujuan meningkatkan dan evaluasi pelayanan pemerintahan pada tingkat Pemerintah Desa/Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.249.550,- dan terealisasi sebesar Rp.205.976.097,- atau 96,14% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyelesaian Masalah Pemerintahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.219.500,- dan terealisasi sebesar Rp.54.260.547,- atau 96,52% dari alokasi anggaran.
- Penegasan Batas Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.675.550,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.354.500,- dan terealisasi sebesar Rp.68.040.000,- atau 91,51% dari alokasi anggaran.

i. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.178.125.413,- dan terealisasi sebesar Rp.177.952.852,- atau 99,90% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.124.578.413,- dan terealisasi sebesar Rp.124.405.852,- atau 99,86% dari alokasi anggaran.
- Temu Koordinasi Bidang Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.320.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Temu Koordinasi Bidang Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.907.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Temu Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.320.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

j. Program Pembinaan Keagamaan

Program ini bertujuan untuk peningkatan pembinaan keagamaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.963.000,- atau 99,36% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Temu Koordinasi Bidang Mental dan Spritual, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.820.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Sarana dan Prasarana Peribadatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.460.000,- dan terealisasi sebesar Rp.29.143.000,- atau 98,92% dari alokasi anggaran.

k. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.794.529.233,- dan terealisasi sebesar Rp.4.773.377.734,- atau 99,56% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.428.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.427.860.350,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.
- Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.692.263.333,- dan terealisasi sebesar Rp.692.200.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.673.725.900,- dan terealisasi sebesar Rp.2.653.317.384,- atau 99,24% dari alokasi anggaran.

l. Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan

Program ini bertujuan meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.134.380,- dan terealisasi sebesar Rp.96.781.850,- atau 99,64% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Operasional Unit Tim Pembina Jasa Konstruksi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.687.000,- dan terealisasi sebesar Rp.56.469.500,- atau 99,62% dari alokasi anggaran.
- Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.447.380,- dan terealisasi sebesar Rp.40.312.350,- atau 99,67% dari alokasi anggaran.

m. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengadaan barang dan jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.013.260.400,- dan terealisasi sebesar Rp.925.720.400,- atau 91,36% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penunjang Kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.690.623.000,- dan terealisasi sebesar Rp.690.533.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.189.600,- dan terealisasi sebesar Rp.127.739.600,- atau 60,77% dari alokasi anggaran.
- Perencanaan dan Pelaporan Pengadaan Barang / Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.072.400,- dan terealisasi sebesar Rp.19.072.400,- atau 79,23% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.200.400,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.175.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



n. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program ini bertujuan menciptakan transparansi, pedoman dan kekuatan hukum pelaksanaan program/kebijakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.650.876.030,- dan terealisasi sebesar Rp.650.347.260,- atau 99,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.298.770.200,- dan terealisasi sebesar Rp.298.429.700,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.
- Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.316.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.168.000,- atau 99,57% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.259.261.330,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Publikasi Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.211.900,- dan terealisasi sebesar Rp.20.196.900,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.678.600,- dan terealisasi sebesar Rp.29.674.330,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Penanganan RANHAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.638.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.617.000,- atau 99,76% dari alokasi anggaran.

o. Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan pada organisasi perangkat daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.338.033.447,- dan terealisasi sebesar Rp.330.219.750,- atau 97,69% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.390.000,- atau 99,72% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kualitas Pelayanan Unit Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp.77.648.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penilaian Kinerja Kebijakan Pelayanan Unit Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.183.447,- dan terealisasi sebesar Rp.79.014.000,- atau 99,79% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.328.750,- atau 91,41% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Pengaduan Unit Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.45.489.000,- atau 96,07% dari alokasi anggaran.
- Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.350.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

p. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Program ini bertujuan untuk menciptakan penataan struktur kelembagaan serta terbinanya perpustakaan Sekretariat Daerah melalui kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

q. Program Pembinaan Ketenagalistrikan

Program ini bertujuan peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang tenaga listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.400.680.496,- dan terealisasi sebesar Rp.23.325.808.172,- atau 95,59% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.000.580.496,- dan terealisasi sebesar Rp.21.957.670.860,- atau 99,80% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Penunjang Penerangan Jalan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.368.137.312,- atau 57,00% dari alokasi anggaran.

r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.932.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.540.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.392.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

s. Program Perlindungan Konsumen dan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan perdagangan dalam wilayah Kabupaten Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.253.671.500,- dan terealisasi sebesar Rp.253.089.000,- atau 99,77% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.862.500,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Formalisasi Perencanaan Koordinasi Koperasi dan Pengembangan UKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.172.500,- dan terealisasi sebesar Rp.31.097.500,- atau 99,76% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyempurnaan Perangkat Peraturan. Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.629.000,- dan terealisasi sebesar Rp.198.129.000,- atau 99,75% dari alokasi anggaran.

t. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah secara bertahap melalui kerja sama antar daerah melalui kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dan Penyediaan Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

u. Program Peningkatan Layanan Keprotokoleran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan protokoler, melalui kegiatan Pelayanan Administrasi Keprotokoleran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.129.400,- dan terealisasi sebesar Rp.111.779.000,- atau 96,25% dari alokasi anggaran.

v. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.584.150.985,- dan terealisasi sebesar Rp.21.124.656.440,- atau 97,87% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.202.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.150.564.000,- atau 74,35% dari alokasi anggaran.
- Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.491.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.442.670.000,- atau 90,01% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.71.942.000,- atau 66,61% dari alokasi anggaran.
- Rapat-rapat Paripurna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.419.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.343.313.000,- atau 81,88% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Reses, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.221.789.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.064.241.000,- atau 87,11% dari alokasi anggaran.
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.237.120.985,- dan terealisasi sebesar Rp.1.172.708.200,- atau 94,79% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.730.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.726.490.340,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.741.000,- dan terealisasi sebesar Rp.132.268.500,- atau 99,64% dari alokasi anggaran.
- Medical Chek Up Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.459.400,- atau 50,52% dari alokasi anggaran.

w. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini melalui kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.307.972.500,- dan terealisasi sebesar Rp.294.363.984,- atau 95,58% dari alokasi anggaran.

x. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program ini bertujuan untuk pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.221.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.218.640.000,- atau 98,71% dari alokasi anggaran.

y. Program Peningkatan Keberdayaan Aparatur dan Masyarakat Pedesaan

Program ini bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.058.904.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.052.979.400,- atau 99,71% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Pembinaan Perekonomian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.680.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemberdayaan Industri Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kecamatan Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.183.029.000,- dan terealisasi sebesar Rp.181.720.000,- atau 99,28% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.715.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.340.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%**.
- Peningkatan Pembinaan Pemerintahan wilayah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.665.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.855.000,- atau 96,26% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.340.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pembinaan Keberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.375.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Peningkatan Pembinaan Pelayanan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.035.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pembinaan Desa dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.325.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.342.000,- atau 94,91% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Dana Kelurahan dan Dana Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.742.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.741.917.400,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.

z. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.013.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

aa. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.599.270.870,- dan terealisasi sebesar Rp.12.922.959.228,- atau 95,03% dari alokasi anggaran.

bb. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program ini melalui kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.389.180.885,- dan terealisasi sebesar Rp.17.043.555.511,- atau 98,01% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Alokasi anggaran Program/Kegiatan yang direncanakan akan dicapai dalam pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 adalah sebesar Rp.128.614.300.468,64 dan terealisasi sebesar Rp.123.497.081.793,00 atau 96,02% dari alokasi anggaran.

Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Administrasi Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.247.891.463,70 dan terealisasi sebesar Rp.72.517.833.691,00 atau 92,68% dari alokasi anggaran.

2. PENGAWASAN

- ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan internal terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang dengan 9 jabatan struktural yang diisi oleh 9 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- ***Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019***

- a. Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran***

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.316.343.000,- dan terealisasi sebesar Rp.309.024.949,- atau 97,69% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.36.990.500,- atau 99,44% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.092.000,- dan terealisasi sebesar Rp.66.967.294,- atau 96,92% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.250.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.492.900,- atau 98,58% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.121.000,- dan terealisasi sebesar Rp.143.284.255,- atau 96,73% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Pelaporan Hasil Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.440.000,- atau 98,37% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.234.008.850,- dan terealisasi sebesar Rp.233.976.500,- atau 99,99% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.668.850,- dan terealisasi sebesar Rp.60.641.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.139.240.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.595.500,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan semangat dan motivasi kerja aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.315.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.074.000,- atau 99,01% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.245.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.055.000,- atau 95,52% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.245.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.774.000,- atau 99,68% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi baik antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pemerintah dengan pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.065.795.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.034.904.100,- atau 98,50% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemeriksaan Reguler SKPD Kabupaten, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.184.750.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeriksaan Reguler Sekolah dan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.425.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeriksaan Reguler Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.185.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp.184.940.600,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.
- Reviu Pelaporan Kabupaten, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.482.705.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Tujuan Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.261.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp.237.858.000,- atau 90,95% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Evaluasi dan Monitoring, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.441.565.000,- dan terealisasi sebesar Rp.440.715.000,- atau 99,81% dari alokasi anggaran.
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.765.000,- dan terealisasi sebesar Rp.123.390.000,- atau 99,70% dari alokasi anggaran.
- Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.945.000,- dan terealisasi sebesar Rp.69.570.000,- atau 98,06% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.112.175.500,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.500.000,- atau 90,36% dari alokasi anggaran.
- Pendampingan dan Asistensi Aparat Fungsional Pengawasan Internal/Eksternal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.875.000,- atau 81,00% dari alokasi anggaran.

f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan serta profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp.85.911.900,- atau 94,63% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.57.177.500,- atau 93,43% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pelatihan Teknis Pengawasan (in House Training), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.744.400,- atau 96,37% dari alokasi anggaran.
- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.990.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Pengawasan yang direncanakan akan dicapai Inspektorat Kabuapten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.2.754.851.850,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.711.491.449,00 atau 98,43% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.497.932.817,04 dan terealisasi sebesar Rp.2.532.385.577,00 atau 101,38% dari alokasi anggaran.

3. PERENCANAAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 orang dengan 16 jabatan struktural yang diisi oleh 16 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.1.087.714.549,- dan terealisasi sebesar Rp.1.076.474.603,- atau 98,97% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.515.487,- dan terealisasi sebesar Rp.77.910.731,- atau 97,98% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.172.62,- dan terealisasi sebesar Rp.53.157.800,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.991.500,- atau 99,83% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.509.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.504.700,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.625.000,- atau 79,86% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.752.486.483,- dan terealisasi sebesar Rp.751.748.757,- atau 99,90% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.179.230.958,- dan terealisasi sebesar Rp.172.536.115,- atau 96,26% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.298.317.012,60 dan terealisasi sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.295.091.778,00 atau 98,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.628.000,60 dan terealisasi sebesar Rp.114.551.000,- atau 99,07% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.492.012,- dan terealisasi sebesar Rp.68.300.000,- atau 99,72% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.297.000,- dan terealisasi sebesar Rp.102.341.778,- atau 98,13% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.899.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.533.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.308.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.225.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui



kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.580.400,- dan terealisasi sebesar Rp.15.496.900,- atau 99,46% dari alokasi anggaran.

e. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan penelitian dan statistik, melalui kegiatan Pengumpulan, Updating & Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.365.000,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.

f. Program Kerjasama Pembangunan

Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan semua stakeholder pembangunan melalui kegiatan Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan melalui Jalur Kemitraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.485.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.160.000.000,- atau 32,99% dari alokasi anggaran.

g. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memadukan perencanaan infrastruktur lingkungan perkotaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.158.117.000,- dan terealisasi sebesar Rp.138.527.400,- atau 87,61% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Perencanaan Pengendalian Kegiatan PAMSIMAS III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.272.000,- dan terealisasi sebesar Rp.72.970.200,- atau 87,63% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Sanitasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp.65.557.200,- atau 87,59% dari alokasi anggaran.



h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan meningkatkan sistem perencanaan yang komprehensif antar semua unit kerja secara *bottom up* dan *top down*, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.891.493.600,- dan terealisasi sebesar Rp.883.931.995,- atau 99,15% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Rancangan RKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.280.000,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Musrembang RKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp.113.140.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Monitoring. Evaluasi. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.232.800,- dan terealisasi sebesar Rp.61.232.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Forum SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.28.380.000,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program / Kegiatan DAK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.390.800,- dan terealisasi sebesar Rp.14.370.800,- atau 99,86% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Berbasis Aplikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp.111.749.200,- atau 99,66% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Koordinasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.392.959.995,- atau 98,24% dari alokasi anggaran.
- Pameran Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.420.000,- atau 99,91% dari alokasi anggaran.

i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini bertujuan meningkatkan daya dukung penciptaan iklim usaha yang sehat dan adil untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.213.720.400,- dan terealisasi sebesar Rp.196.716.400,- atau 92,04% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengkajian dan evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TPID, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.133.720.400,- dan terealisasi sebesar Rp.126.662.800,- atau 94,72% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.939.200,- atau 87,35% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Analisis Pengembangan Komoditas Pertanian Kab, Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.35.114.400,- atau 87,79% dari alokasi anggaran.

j. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan mengintegrasikan optimalisasi pengendalian dan pemanfaatan potensi fisik alam, ruang, dan prasarana publik melalui kegiatan Koordinasi Bidang Ekonomi, SDA dan Pengembangan Infrastruktur, dengan



alokasi anggaran sebesar Rp.38.354.100,- dan terealisasi sebesar Rp.36.847.800,- atau 96,07% dari alokasi anggaran.

k. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan mengembangkan dan meningkatkan sistem perencanaan yang unggul dalam mengkaji implementasi program pembangunan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.178.000,- dan terealisasi sebesar Rp.80.943.000,- atau 99,71% dari alokasi anggaran.

l. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini bertujuan menciptakan katalisasi pembangunan potensi sumber daya manusia yang mandiri, bermoral dan sejahtera, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.518.200,- dan terealisasi sebesar Rp.206.848.200,- atau 98,26% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembinaan Operasional Program Kabupaten Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.298.200,- dan terealisasi sebesar Rp.68.297.700,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.659.600,- dan terealisasi sebesar Rp.50.629.100,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Program Kabupaten Peduli HAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.535.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.486.000,- atau 99,35% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemantauan dan Evaluasi Capaian SDGs Bidang Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.803.400,- dan terealisasi sebesar Rp.17.763.400,- atau 99,78% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Musrembang Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.141.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.591.000,- atau 90,69% dari alokasi anggaran.
- Kegiatan Musrembang Pemuda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.081.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Perencanaan yang direncanakan akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.3.559.901.261,60 dan terealisasi sebesar Rp.3.170.776.076,00 atau 89,07% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.608.938.398,37 dan terealisasi sebesar Rp.2.451.811.199,00 atau 93,98% dari alokasi anggaran.

4. KEUANGAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sebagai instansi yang disertai tugas melakukan koordinasi urusan keuangan untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 55 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Sedangkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 46 orang dengan 21 jabatan struktural



yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.408.935.894,- dan terealisasi sebesar Rp.2.271.553.613,- atau 94,30% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.78.691.827,- atau 80,30% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.647.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp.590.991.500,- atau 91,25% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.82.339.000,- atau 88,06% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.125.000,- atau 97,73% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp.84.173.900,- atau 97,80% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.188.000,- atau 51,25% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.690.102.605,- dan terealisasi sebesar Rp.672.511.900,- atau 97,45% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.743.573.289,- dan terealisasi sebesar Rp.729.532.486,- atau 98,11% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.692.332.500,- dan terealisasi sebesar Rp.643.369.189,- atau 92,93% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.894.000,- atau 99,41% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.277.390.000,- dan terealisasi sebesar Rp.265.415.000,- atau 95,68% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.067.500,- dan terealisasi sebesar Rp.120.884.500,- atau 99,85% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.224.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.187.800.689,- atau 83,65% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.375.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui kegiatan Pengadaan Pakaian



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.235.508.000,- dan terealisasi sebesar Rp.226.922.000,- atau 96,35% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.108.000,- dan terealisasi sebesar Rp.80.772.000,- atau 97,19% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.146.150.000,- atau 95,90% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.38.100.000,- atau 95,25% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.448.400,- dan terealisasi sebesar Rp.179.889.000,- atau 99,69% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.464.400,- dan terealisasi sebesar Rp.52.441.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.004.950,- dan terealisasi sebesar Rp.71.473.000,- atau 99,26% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.979.050,- dan terealisasi sebesar Rp.55.975.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan meningkatkan sistem pengelolaan dan transparansi akuntabilitas keuangan pada publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.469.242.972,55 dan terealisasi sebesar Rp.3.837.487.975,00 atau 85,86% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.114.395,- dan terealisasi sebesar Rp.148.540.000,- atau 78,96% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan DPA-SKPD dan Penunjang Administrasi SPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.260.290,- dan terealisasi sebesar Rp.92.260.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.168.540.283,- dan terealisasi sebesar Rp.143.672.000,- atau 85,24% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.765.000,- dan terealisasi sebesar Rp.150.993.800,- atau 99,49% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.59.633.000,- atau 99,39% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.266.000,- dan terealisasi sebesar Rp.184.850.000,- atau 63,68% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.397.000,- dan terealisasi sebesar Rp.11.835.000,- atau 12,28% dari alokasi anggaran.
- Analisa Perencanaan Kebutuhan Barang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.434.000,- dan terealisasi sebesar Rp.95.150.000,- atau 98,67% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.769.000,- dan terealisasi sebesar Rp.29.714.000,- atau 85,46% dari alokasi anggaran.
- Monitoring Evaluasi LPJ Penatausahaan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.460.100,- atau 94,50% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengeluaran dan Penerimaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.124.605.832,55 dan terealisasi sebesar Rp.85.790.000,- atau 68,85% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Jasa Administrasi KASDA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.886.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.556.000,- atau 77,73% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut MPTGKD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.671.000,- **realisasi fisik dan keuangan 0%**.
- Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.897.169,- dan terealisasi sebesar Rp.82.076.800,- atau 91,30% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Jasa Adminitrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.77.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.77.252.000,- atau 99,87% dari alokasi anggaran.

- Pelayanan Jasa Adminitrasi Belanja Langsung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.458.003,- dan terealisasi sebesar Rp.92.396.875,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Daerah PAD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.63.797.500,- atau 99,68% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan ADM, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.410.000,- atau 47,63% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan PBB-P2, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.437.745.000,- dan terealisasi sebesar Rp.404.339.400,- atau 92,37% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Perencanaan Pendapatan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.272.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.245.126.500,- atau 90,02% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pelayanan BPHTB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.396.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.357.873.500,- atau 90,37% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.144.366.000,- dan terealisasi sebesar Rp.144.298.500,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Efektifitas Penatausahaan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.998.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Peningkatan Penagihan Pajak dan Retribusi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.165.976.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.156.518.000,- atau 99,19% dari alokasi anggaran.
- Revaluasi Asset / Barang Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.268.281.500,- dan terealisasi sebesar Rp.118.947.000,- atau 44,34% dari alokasi anggaran.

g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan tersedianya data yang akurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.656.899.367,- dan terealisasi sebesar Rp.656.561.250,- atau 99,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.059.000,- dan terealisasi sebesar Rp.131.006.500,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Fasilitasi Penertiban dan Keberatan dalam Pelayanan Pajak dan Retribusi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.77.112.500,- atau 99,76% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pengawasan Regulasi Pajak dan Retribusi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.64.992.500,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pengelolaan Benda Berharga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.383.540.367,- dan terealisasi sebesar Rp.383.449.750,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Keuangan yang direncanakan akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.8.683.367.133,55 dan terealisasi sebesar Rp.7.853.883.027,00 atau 90,45% dari alokasi anggaran.



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.294.742.906.159,73 dan terealisasi sebesar Rp.283.848.437.691,57 atau 96,30% dari alokasi anggaran.

5. URUSAN KEPEGAWAIAN

- ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa yang dahulu bernama Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa sebagai instansi yang disertai tugas melakukan koordinasi kepegawaian untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 47 orang dengan 17 jabatan struktural yang diisi oleh 17 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- ***Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019***

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.393.804.881,- dan terealisasi sebesar Rp.391.153.750,- atau 99,33% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.423.800,- dan terealisasi sebesar Rp.60.023.800,- atau 96,16% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.327.181.081,- dan terealisasi sebesar Rp.326.929.950,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.655.850,- dan terealisasi sebesar Rp.174.559.700,- atau 99,94% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.687.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.258.350,- dan terealisasi sebesar Rp.109.162.200,- atau 99,91% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.710.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.776.000,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.



d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.036.000,- dan terealisasi sebesar Rp.36.026.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.739.212.650,- dan terealisasi sebesar Rp.739.138.500,- atau 99,99% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.977.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.909.500,- atau 99,71% dari alokasi anggaran.
- Proses Seleksi Penetapan PNS Rekomendasi Izin Belajar dan Tugas belajar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.540.150,- dan terealisasi sebesar Rp.3.537.500,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.587.297.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Workshop Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.199.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Bimbingan Teknis Strategi Perencanaan SDM Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.199.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.195.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.

f. Program Pendidikan Kedinasan

Program ini bertujuan untuk melakukan pengembangan pendidikan karir PNS, dengan alokasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

anggaran sebesar Rp.749.547.750,- dan terealisasi sebesar Rp.745.114.750,- atau 99,41% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pendidikan Penjenjangan Struktural Tk. III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.741.594.000,- dan terealisasi sebesar Rp.737.179.000,- atau 99,40% dari alokasi anggaran.
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.953.750,- dan terealisasi sebesar Rp.7.935.750,- atau 99,77% dari alokasi anggaran.

g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan karir PNS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.844.041.276,- dan terealisasi sebesar Rp.711.066.900,- atau 84,25% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.71.996.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Seleksi. Pengangkatan dan Penempatan menjadi CPNS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.350.857.176,- dan terealisasi sebesar Rp.230.795.400,- atau 65,78% dari alokasi anggaran.
- Seleksi Terbuka pada Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.276.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp.265.208.000,- atau 96,06% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan dan Evaluasi Formasi Kebutuhan Pegawai (Bezetting) dan Formasi Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.145.104.100,- dan terealisasi sebesar Rp.143.067.500,- atau 98,60% dari alokasi anggaran.



h. Program Pengembangan Data Informasi

Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan data dan informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.098.850,- dan terealisasi sebesar Rp.108.088.500,- atau 99,99% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Sistem dan Mekanisme Layanan Kepegawaian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.758.600,- dan terealisasi sebesar Rp.46.750.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Pengumpulan. Updating dan Analisis dan Data Kepegawaian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.340.250,- dan terealisasi sebesar Rp.61.338.500,- atau 100% dari alokasi anggaran.

i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.480.250,- dan terealisasi sebesar Rp.110.079.500,- atau 97,87% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.794.000,- dan terealisasi sebesar Rp.32.398.000,- atau 93,11% dari alokasi anggaran.
- Proses Penanganan Kasus-kasus Disiplin. Cuti dan Perizinan PNS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.952.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemberhentian dan Pensiun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.733.750,- dan terealisasi sebesar Rp.48.729.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.



Alokasi anggaran program/kegiatan urusan kepegawaian yang direncanakan akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.3.192.677.507,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.050.003.600,00 atau 95,53% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.451.923.345,97 dan terealisasi sebesar Rp.3.260.359.707,00 atau 94,45% dari alokasi anggaran.

6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa yang disertai tugas melakukan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 orang dengan 13 jabatan struktural yang diisi oleh 13 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- ***Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019***

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan anggaran sebesar Rp.314.026.500,- dan terealisasi sebesar Rp.311.106.965,- atau 99,07% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.040.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.239.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.942.500,- dan terealisasi sebesar Rp.80.792.759,- atau 99,82% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.223.605.000,- dan terealisasi sebesar Rp.220.835.206,- atau 98,76% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan anggaran sebesar Rp.128.262.000,- dan terealisasi sebesar Rp.125.913.588,- atau 98,17% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp.79.416.000,- atau 99,81% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.492.000,- dan terealisasi sebesar Rp.38.297.588,- atau 94,58% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan anggaran sebesar Rp.30.100.000,-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.100.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan anggaran sebesar Rp.23.692.500,- dan terealisasi sebesar Rp.23.674.600,- atau 99,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.915.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.899.000,- atau 99,91% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.777.500,- dan terealisasi sebesar Rp.6.775.600,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.

e. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Program ini dengan anggaran sebesar Rp.67.350.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengembangan Jaringan Kelibangan Daerah. Regional dan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.760.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Litbang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.590.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah

Program ini dengan anggaran sebesar Rp.207.989.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Kajian Terkait Pengembangan Potensi Wisata Pada Sumber Air Panas Pecong dan Sekitarnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.733.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Kajian / Penelitian dalam Bidang Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.250.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penelitian Pengembangan Kesehatan Olah Raga pada Masyarakat di Kabupaten Gowa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.005.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Program ini dengan anggaran sebesar Rp.180.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp.180.095.000,- atau 99,53% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- FGD Inovasi dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Inovasi bagi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.605.000,- dan terealisasi sebesar Rp.41.997.500,- atau 98,57% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Rencana Induk Kelitbang (RIK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.702.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Desiminasi Hasil Kajian dan Penelitian dan Inovasi Kelitbangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.642.500,- dan terealisasi sebesar Rp.35.395.000,- atau 99,31% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pameran Pembangunan dan Parade Bunga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang direncanakan akan dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.952.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.946.229.153,00 atau 99,36% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.392.620.008,27 dan terealisasi sebesar Rp.1.285.716.105,00 atau 92,32% dari alokasi anggaran.

A. 3. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani urusan pemerintahan umum telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dengan 14 jabatan struktural yang diisi oleh 14 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.309.123.130,- dan terealisasi sebesar Rp.308.809.000,- atau 99,90% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp.166.351.500,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.783.130,- dan terealisasi sebesar Rp.136.557.500,- atau 99,84% dari alokasi anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.444.870,- dan terealisasi sebesar Rp.90.921.880,- atau 98,35% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.284.870,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.815.010,- atau 99,26% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.41.162.000,- atau 96,85% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.660.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan alokasi anggaran sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.31.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengadaan Mesin / Kartu Absensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja, dengan alokasi anggaran sebesar R.32.307.000p,- dan terealisasi sebesar Rp.32.293.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.520.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Renstra, Renja dan RKA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.787.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.773.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.

e. Program Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Politik dan Ormas

Program ini bertujuan meningkatkan peranan lembaga sosial politik dan ormas dalam menciptakan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi ditengah-tengah masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.154.500,- dan terealisasi sebesar Rp.35.094.500,- atau 99,83% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuang Keuangan Parpol, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.275.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pendataan dan Pembinaan Ormas dan LSM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.879.500,- dan terealisasi sebesar Rp.30.819.500,- atau 99,81% dari alokasi anggaran.



f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Bela Negara), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Program Pembentukan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program ini bertujuan untuk peningkatan pembentukan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya di tiap-tiap Desa/Kelurahan melalui kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.043.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.841.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pemantauan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.325.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.516.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini melalui kegiatan Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

j. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini bertujuan peningkatan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, dengan alokasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

anggaran sebesar Rp.63.011.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (KOMINDA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.020.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Forum Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.067.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Efektifitas Penanganan Konflik Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.924.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

k. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Program ini bertujuan meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba (NGO/AKTUAL), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.422.000,- dan terealisasi sebesar Rp.37.324.500,- atau 99,74% dari alokasi anggaran.

l. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan ormas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.199.915.500,- dan terealisasi sebesar Rp.198.859.000,- atau 99,47% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Koordinasi Instansi Terkait dengan Parpol, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.700.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.550.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyuluhan Kepada Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.102.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Desk Pilkada, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.563.000,- dan terealisasi sebesar Rp.139.506.500,- atau 99,25% dari alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Program/Kegiatan urusan pemerintahan umum yang direncanakan akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.959.262.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.956.196.880,00 atau 99,68% dari alokasi anggaran.

Selanjutnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.998.608.899,27 dan terealisasi sebesar Rp.1.710.447.209,00 atau 85,58% dari alokasi anggaran.

B. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis merupakan suatu aturan – aturan yang dibuat oleh Pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Adapun strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2016 - 2021 yang tertuang dari beberapa misi sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis pada Hak-Hak Dasar, Kesetaraan Gender, Nilai Budaya dan Agama.

- 1) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas“, diterapkan:



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

-
- Strategi 1 : Peningkatan layanan dan mutu pendidikan untuk semua.
- Arah Kebijakan 1 : Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan secara merata dan proporsional.
- Arah Kebijakan 2 : Peningkatan mutu dan pemerataan pendidik dan tenaga pendidikan.
- 2) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas“, diterapkan:
- Strategi 2 : Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik pada upaya yang bersifat promotif dan preventif maupun pada upaya yang bersifat kuratif dan rehabilitatif secara proporsional.
- Arah Kebijakan 3 : Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui penambahan jumlah tenaga, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- 3) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman“, diterapkan:
- Strategi 3 : Peningkatan ketersediaan, distribusi, keamanan pangan dan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan melalui desa mandiri.
- Arah Kebijakan 4 : Penguatan ketahanan pangan.
- 4) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya layanan perumahan yang layak“, diterapkan:
- Strategi 4 : Pengembangan sistem drainase dan utilitas berbasis jaringan terpadu.
- Arah Kebijakan 5 : Penataan perumahan dan pemukiman layak huni.
- 5) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha“, diterapkan:
- Strategi 5 : Peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusdiklat ketenagakerjaan.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Arah Kebijakan 6 : Peningkatan peluang dan kesempatan kerja.

Arah Kebijakan 7 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

- 6) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya rasa aman dan tenteram“, diterapkan:

Strategi 6 : Pengembangan sistem keamanan lingkungan.

Arah Kebijakan 8 : Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Arah Kebijakan 9 : Penanganan bencana dan kebakaran.

- 7) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak“, diterapkan:

Strategi 7 : Peningkatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun kontrol dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Arah Kebijakan 10 : Pengarusutamaan gender.

Arah Kebijakan 11 : Pengarusutamaan hak anak.

- 8) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana“, diterapkan:

Strategi 8 : Penurunan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan angka kelahiran total (TFR) menuju penduduk tumbuh seimbang melalui penyadaran Program KB pada keluarga miskin dan pendidikan kesehatan reproduksi.

Arah Kebijakan 12 : Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan pemakaian kontrasepsi (CPR) baik laki-laki maupun perempuan.

Arah Kebijakan 13 : Penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) dan angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).



9) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan“, diterapkan:

Strategi 9 : Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan memastikan terpenuhinya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam proses pembangunan bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan usia, jenis kelamin, kebutuhan yang berbeda, disabilitas dan sosial.

Arah Kebijakan 14 : Peningkatan kemandirian para fakir miskin komunitas adat terpencil, dan PMKS.

10) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan olahraga“, diterapkan:

Strategi 10 : Sinergitas stakeholder dalam pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga.

Arah Kebijakan 15 : Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan dan fasilitasi cabang olahraga.

11) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya“, diterapkan:

Strategi 11 : Revitalisasi keragaman dan kekayaan budaya.

Arah Kebijakan 16 : Pemeliharaan nilai-nilai budaya masyarakat.

12) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius“, diterapkan :

Strategi 12 : Peningkatan kapasitas penyuluh agama dan lembaga-lembaga keagamaan.

Arah Kebijakan 17 : Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.

MISI 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis pada Potensi Unggulan dan Ekonomi Kerakyatan

13) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan“, diterapkan:

Strategi 13 : Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan dan perikanan.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Arah Kebijakan 18 : Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan.
- 14) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”, diterapkan:
- Strategi 14 : Peningkatan status baku mutu air dan penegakan hukum lingkungan.
- Arah Kebijakan 19 : Peningkatan pengawasan dan pemantauan status baku mutu air.
- Arah Kebijakan 20 : Pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan.
- 15) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengembangan koperasi dan UMKM, diterapkan:
- Strategi 15 : Peningkatan usaha ekonomi produktif bagi pelaku ekonomi mikro, kecil, menengah yang pro gender, disabilitas, kelompok marginal dan minoritas lainnya.
- Arah Kebijakan 21 : Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM.
- 16) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif”, diterapkan:
- Strategi 16 : Promosi dan pemasaran potensi wisata unggulan.
- Arah Kebijakan 22 : Pengembangan potensi wisata unggulan.
- Arah Kebijakan 23 : Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif.
- 17) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya iklim investasi dan perdagangan”, diterapkan:
- Strategi 17 : Menjamin kelancaran arus distribusi barang dan jasa melalui fasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha.
- Arah Kebijakan 24 : Peningkatan perluasan informasi barang dan jasa serta peluang investasi daerah yang dapat dikembangkan.
- Arah Kebijakan 25 : Peningkatan kualitas perdagangan berbasis pasar rakyat.



MISI 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berorientasi pada Interkoneksi Antar Wilayah dan Sektor

18) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan dan pengairan“, diterapkan:

Strategi 18 : Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan, jembatan dan irigasi.

Arah Kebijakan 26 : Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan dan jaringan irigasi.

19) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya“, diterapkan:

Strategi 19 : Pengembangan taman tematik dan perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.

Arah Kebijakan 27 : Pemanfaatan ruang terbuka hijau.

20) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kawasan permukiman“, diterapkan:

Strategi 20 : Peningkatan sarana dan prasarana air minum, penanaman budaya bersih serta penanganan sampah berbasis masyarakat (3R).

Arah Kebijakan 28 : Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum.

Arah Kebijakan 29 : Gerakan Gowa Bersih.

Arah Kebijakan 30 : Peningkatan aksesibilitas sanitasi.

MISI 4: Meningkatkan Pengembangan Wilayah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

21) Untuk mencapai sasaran “Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan“, diterapkan:

Strategi 21 : Peningkatan kapasitas dan peran lembaga pemasyarakatan desa dan kelurahan serta lembaga adat dan sosial budaya masyarakat.

Arah Kebijakan 31 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Arah Kebijakan 32 : Peningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan serta lembaga adat dan sosial budaya masyarakat.

Arah Kebijakan 33 : Pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

Arah Kebijakan 34 : Optimalisasi penggunaan dan pengawasan keuangan desa.

Arah Kebijakan 35 : Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi.

22) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kerjasama dan keintegrasian pengembangan wilayah berbasis kawasan“, diterapkan:

Strategi 22 : Pengembangan kawasan strategis secara terpadu.

Arah Kebijakan 36 : Optimalisasi pemanfaatan kawasan strategis.

Arah Kebijakan 37 : Pengembangan kawasan pedesaan.

MISI 5: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Demokratis

23) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas pemerintahan“, diterapkan:

Strategi 23 : Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Arah Kebijakan 38 : Pembinaan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu.

Arah Kebijakan 39 : Pengembangan perangkat daerah sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Arah Kebijakan 40 : Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan secara efektif dan efisien.

Arah Kebijakan 41 : Pengembangan ketatalaksanaan, kearsipan, persandian, sistem dan budaya kerja perangkat daerah berbasis teknologi informasi.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Arah Kebijakan 42 : Pengembangan SDM aparatur, pembinaan karier berbasis kompetensi.

Arah Kebijakan 43 : Pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan berbasis sistem inovasi daerah.

24) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah”, diterapkan:

Strategi 24 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Arah Kebijakan 44 : Peningkatan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual.

Arah Kebijakan 45 : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas pencapaian target dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

25) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan publik”, diterapkan:

Strategi 25 : Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan inovasi satu layanan satu inovasi dan pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Arah Kebijakan 46 : Pengembangan inovasi layanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat.

26) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi”, diterapkan:

Strategi 26 : Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Arah Kebijakan 47 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset.



27) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial politik”, diterapkan:

Strategi 27 : Penguatan kelembagaan partai politik.

Arah Kebijakan 48 : Peningkatan pembinaan partai politik dan organisasi politik.

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Gowa Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2018, sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Khusus DPRD, berupa catatan strategis sebagai masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menentukan kebijakan kedepan sebagai berikut :

1. URUSAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DPRD Kabupaten Gowa memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang setiap tahun mengalami peningkatan, namun DPRD perlu memberikan catatan dan rekomendasi bahwa perlu ada upaya – upaya ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang baru yang tidak memberatkan masyarakat, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah dilakukan secara ketat khususnya penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, dan meminta kepada pemerintah daerah agar mencari formula beserta sistem penyerapan anggaran belanja daerah agar lebih maksimal sehingga dapat mempercepat perputaran roda perekonomian yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;



2. URUSAN PENDIDIKAN

DPRD Kabupaten Gowa memberikan apresiasi terhadap Pemda atas keberhasilan mendapatkan penghargaan dan prestasi, namun DPRD Kabupaten Gowa memberikan rekomendasi seperti Gedung-gedung sekolah yang rusak agar mendapatkan perhatian untuk perbaikan/rehabilitasi, perlunya peningkatan dan pengembangan kualitas layanan pendidikan dan meminta adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, serta mengharapkan agar memperhatikan kesejahteraan guru honorer sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar, mengharapkan penataan pendidikan disemua jenjang yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Gowa;

3. URUSAN KESEHATAN

DPRD Kabupaten Gowa memberikan apresiasi atas kinerja layanan kesehatan, namun DPRD perlu memberikan rekomendasi terkait peningkatan SDM baik kuantitas dan kualitasnya guna meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, meminta adanya peningkatan sarana dan prasarana disetiap puskesmas karena masih banyak alat-alat penunjang seperti tempat tidur, ruang perawatan yang belum representative, dan perlunya dimaksimalkan fungsi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, serta DPRD meminta agar Pemda memperhatikan kesejahteraan tenaga medis honorer;

4. URUSAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG

DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemda terhadap pembangunan jalan yang meningkat, namun DPRD meminta kepada Pemda dalam pengalokasian anggaran betonisasi jalan agar memperhatikan kegiatan tidak hanya jalannya saja tetapi termasuk korban jiwa, DPRD perlu juga memberikan rekomendasi agar pengawasan atas kualitas fisik pembangunan jalan untuk lebih ditingkatkan, saluran drainase yang ada agar dilakukan pelebaran dan lebih diperdalam sehingga akan mempercepat serapan air hujan, meminta untuk dilakukan penataan ulang secara terpadu terhadap keberadaan utilitas agar ditata secara baik, dan mengharapkan adanya



pemeliharaan dan pemasangan lampu penerangan jalan agar kota tidak terkesan gelap;

5. URUSAN SOSIAL

DPRD memberikan apresiasi kepada Pemda terhadap kinerja terkait kesejahteraan sosial, namun DPRD perlu memberikan catatan dan rekomendasi kepada Pemda bahwa perlu peningkatan pengalokasian anggaran yang belum mendapatkan fasilitas KIS;

6. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja dalam penataan sampah dan kebersihan, namun DPRD perlu memberikan catatan dan rekomendasi bahwa perlu peningkatan sosialisasi pemilihan dan pemanfaatan sampah rumah tangga sehingga volume sampah yang diangkut ke tempat-tempat pembuangan sampah lebih berkurang, DPRD meminta kepada Pemda agar pengelolaan sampah di Kota Sungguminasa dan sekitarnya lebih ditingkatkan termasuk penambahan armada angkutan sampah;

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DPRD Kabupaten Gowa memberikan rekomendasi atas kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa, namun DPRD perlu memberikan catatan dan rekomendasi bahwa pelaksanaan program kegiatan tapal batas desa dimana pengalokasian anggaran cukup besar namun tidak sebanding dengan fisik yang terkesan kurang memadai, begitupun juga program kegiatan pengadaan mobil sampah disetiap desa yang dialokasikan anggaran disetiap Desa, namun tidak semua desa membutuhkan mobil sampah khususnya Desa dataran tinggi, sehingga akan menambah beban desa dalam pembiayaan operasional kendaraan sampah;

8. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DPRD Kabupaten Gowa memberikan apresiasi terhadap kinerja Bappeda, namun DPRD perlu memberikan catatan dan rekomendasi mengenai sistem perencanaan dan proses musrenbang hanya dijadikan kegiatan rutinitas tetapi dalam pelaksanaan perencanaan ada wilayah yang sudah puluhan



tahun mengusulkan tetap tidak masuk dalam prioritas perencanaan;

9. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

DPRD Kabupaten Gowa memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, namun DPRD memberikan catatan dan rekomendasi agar peningkatan pengelolaan PAD mengenai perizinan perlu lebih dimaksimalkan dimasa yang akan datang.



BAB IV

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

A. URUSAN PEMERINTAHAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa *“Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Oleh karena itu, maka pada hakekatnya sesuai dengan aturan tersebut di atas, tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, dimana pelaksanaannya tercermin dari adanya kontribusi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi pemberi tugas pembantuan, dalam hal pembiayaan pembangunan.

Adapun Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada periode tahun 2019, menurut masing-masing pelaksana teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya adalah sebagai berikut :

I. Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

1. Tugas Pembantuan yang diterima dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa dengan rincian sebagai berikut :

a. Dasar Hukum pelaksanaan Surat Pengesahan DIPA 018.08.4.199133/2019 Tanggal 05 Desember 2018

b. Program Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima sebagai berikut:

(1) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian;



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

- (2) Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Pengawasan Alat Pertanian;
 - (3) Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - (4) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
 - (5) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.
- c. Sumber Dana yang digunakan adalah APBN Pokok T.A. 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.335.225.000,- dan dapat direalisasikan penyerapannya sebesar Fisik 100 persen dan Keuangan 99,57 persen.
2. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dasar Hukum pelaksanaan Surat Pengesahan DIPA 018.04.4.199126/2019, Tanggal 05 Desember 2018.
 - b. Program Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima sebagai berikut:
 - (1) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
 - (2) Pengelolaan Data dan Informasi
 - c. Anggaran ini bersumber dari Dana APBN-TP Tahun 2019, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.28.900.000,- dan dapat direalisasikan penyerapannya sebesar Fisik 100 persen dan Keuangan 99,98 persen.
3. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dasar Hukum pelaksanaan Surat Pengesahan DIPA 018.03.4.199125/2019, Tanggal 05 Desember 2018.
 - b. Program Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima sebagai berikut:



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

- (1) Fasilitasi Pasca Panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
 - (2) Fasilitasi Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura lainnya, Fasilitasi Alsintan dan sarana Prasarana Pasca panen Hortikultura lainnya
 - (3) Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana Pengolahan Hortikultura lainnya
 - (4) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
 - (5) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
- c. Anggaran ini bersumber dari Dana APBN-TP Tahun 2019, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.690.570.000,- dan dapat direalisasikan penyerapannya sebesar Fisik 100 persen dan Keuangan 100 persen.

II. Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

1. Tugas Pembantuan yang diterima dari Direktorat Pengembangan Perluasan Kesempatan kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Gowa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dasar Hukum pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Nomor KEP 709/PPTKPKK/IV/2019 Tanggal 02 April 2019.
 - b. Program Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima sebagai berikut :
 - (1) Tenaga Kerja Padat karya Infrastruktur Jalan Rabat Beton Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong.
 - (2) Tenaga Kerja Mandiri Usaha Menjahit Desa Julupamai Kecamatan Pallangga.
 - (3) Tenaga Kerja Mandiri Usaha Menjahit Desa Lempangan Kecamatan Bajeng.
 - (4) Tenaga Kerja Mandiri Usaha Menjahit Desa Kanjilo Kecamatan Barombong.



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

- c. Sumber Dana yang digunakan adalah APBN Pokok T.A. 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dan dapat direalisasikan penyerapannya sebesar Fisik 100 persen dan Keuangan 100 persen.

III. Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dasar Hukum pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 952 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 829 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Dindanai Melalui Tugas Pembantuan.
 - b. Program Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima sebagai berikut :
 - (1) Pembangunan Pasar Lauwa (Konstruksi).
 - (2) Pengawasan Pembangunan Pasar Lauwa.
 - (3) Pembangunan Pasar Balang-Balang (Konstruksi).
 - (4) Pengawasan Pembangunan Pasar Balang-Balang.
 - (5) Pembangunan Pasar Limbung II (Konstruksi)
 - (6) Pengawasan Pembangunan Pasar Limbung II
 - c. Sumber Dana yang digunakan adalah APBN T.A. 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.623.182.000,- dan dapat direalisasikan penyerapannya sebesar fisik 100 persen dan Keuangan 99,37 persen.



B. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

I. Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.

II. Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.

III. Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.



BAB V P E N U T U P

Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam tahun 2019.

Sebagai output penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa yakni hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, merupakan wujud pelaksanaan tugas dari segenap aparatur pemerintah daerah. Keberhasilan yang telah dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi dari semua komponen Pemerintahan Daerah, yang menjalankan fungsi eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga kondisi tersebut akan membentuk *check and balances* yang seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Mudah-mudahan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Gowa dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada periode kepemimpinan kami, patut disyukuri mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya untuk dapat seoptimal mungkin mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat. Hal ini menjadi komitmen perencanaan pemerintah sekaligus tolok ukur untuk mendorong kinerja aparat pemerintah daerah untuk semakin baik dan semakin berkualitas.



Dibalik semua capaian kinerja yang telah dihasilkan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari sisi sumber daya maupun faktor-faktor lainnya di luar jangkauan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gowa. Namun demikian berbagai upaya telah dilaksanakan untuk pencapaian seluruh indikator yang menjadi target pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2019, yang pada akhirnya semua capaian indikator tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Gowa.

Disadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun tersebut masih terdapat banyak keterbatasan, oleh karenanya semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi catatan yang bermanfaat dan menjadi umpan balik untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Gowa pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan Nya kepada kita sekalian.

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH.